



**KONFLIK PEMILIHAN KEPALA DESA CERMEE, KECAMATAN  
CERMEE, KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015-2016**

**Skripsi**

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Sejarah (S1) dan  
mencapai gelar Sarjana Humaniora**

**Oleh**

**SRI WAHYUNI  
NIM. 140110301006**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Wahyuni

NIM : 140110301006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Konflik Pemilihan Kepala Desa Cermee, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2016” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan tidak benar.

Jember, Juli 2019

Yang menyatakan,

Sri Wahyuni  
NIM. 140110301006

**PERSETUJUAN**

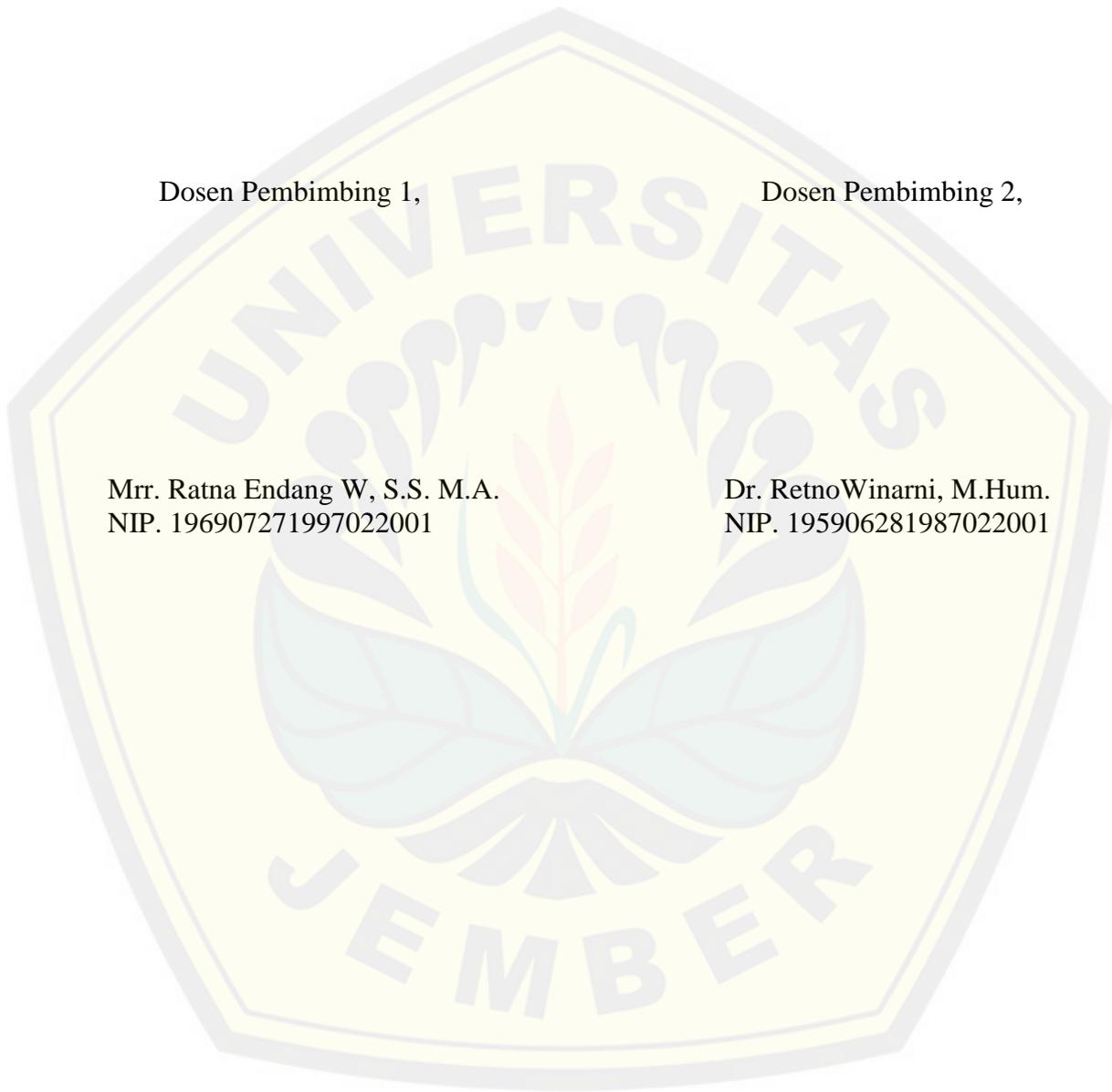
Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan oleh :

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,

Mrr. Ratna Endang W, S.S. M.A.  
NIP. 196907271997022001

Dr. Retno Winarni, M.Hum.  
NIP. 195906281987022001



**PENGESAHAN**

Diterima dan disahkan oleh :

Panitia Penguji Skripsi Program Strata 1

Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Pada hari :

Tanggal :

Ketua

Sekretaris

Mrr. Ratna Endang W, S.S. M.A.  
NIP. 196907271997022001

Dr. Retno Winarni, M.Hum.  
NIP. 195906281987022001

Penguji 1

Penguji 2

Drs. Nurhadi Sasmita, M.Hum  
NIP.196012151989021001

Dra. Dewi Salindri, M.Si  
NIP.196211061988022001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum  
NIP.196805161992011001

## PERSEMBAHAN

Karya ini sebagai persembahan untuk:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Jamin dan Ibunda Rihanna. Terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan untukku, pemacu semangat hidupku dan tidak henti-hentinya memberikan doa yang tidak pernah berhenti beliau ucapkan, sehingga membentuk manusia sederhana ini. Serta selalu memberikan semangat dan dukungan yang terbaik untukku, sehingga aku bisa menjadi seperti sekarang ini. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk ayah dan ibu penulis. Amin;
2. Terima kasih untuk suami penulis, Mochammad Rois, S.Pd yang selalu membantu disaat mencari data, serta selalu mendoakan yang terbaik, dan juga memberikan semangat dan dukungan untuk penulis.
3. Terima kasih untuk saudara kandung penulis Kusnadi dan ipar penulis Yatik, dan Amanda, yang selama ini juga telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis. Serta untuk adik penulis Mochammad Wafi G yang selalu menghibur penulis.
4. Terima kasih untuk Nenek Alm. Sinami, selama beliau masih hidup, selalu mendoakan penulis yang terbaik, dan memberikan dukungan dan semangat.
5. Terima kasih untuk Nenek Tikno, yang selama ini selalu memberikan semangat serta mendoakan penulis.
6. Terima kasih untuk teman-teman jurusan sejarah angkatan 2014.
7. Dunia intelektual, semoga karya penulis dapat menambah khasanah kajian akademis
8. Almamater tercinta Universitas Jember

**MOTTO**

HHN

Hadapi : Hadapi semua proses yang ada

Hayati : Hayati apa yang telah kita impikan dan agar bisa tercapai

Nikmati : Nikmati hasil proses yang telah kita lalui

(Sri Wahyuni)

“Aku telah belajar bahwa sukses bukan diukur dengan posisi yang dicapai seseorang didalam hidupnya, tetapi oleh hambatan yang telah diatasinya ketika ia berusaha meraih sukses.”

(Booker T Wasington)

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini mengkaji tentang konflik dalam pemilihan kepala desa dengan judul “Konflik Pemilihan Kepala Desa Cermee, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2016”. Konflik pemilihan kepala desa kerap terjadi dalam proses pemilihan, hal ini sudah menjadi pesta demokrasi dalam dunia politik. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang berselisih akibat adanya perbedaan pendapat diantara masing-masing pendukung.

Tugas akhir pada jenjang perkuliahan merupakan hasil penyusunan karya ilmiah mandiri oleh mahasiswa. Penulis telah melakukan beberapa kali diskusi bersama para dosen dan rekan mahasiswa, serta melakukan pencarian beberapa sumber, sehingga menetapkan permasalahan mengenai konflik pilkades sebagai kajian. Usaha dalam penyusunan skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu syarat mendapat gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.

Penyusunan sampai terselesaikannya karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum., Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember,
2. Prof. Drs. Nawiyanto, MA., Ph.D., Ketua Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember,
3. Mrr. Ratna Endang W, S.S. M.A dan Dr. RetnoWinarni, M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran mengarahkan, membimbing, memotivasi dan meluangkan waktu, pikiran serta perhatian dalam penulisan skripsi ini,
4. Drs. Nurhadi Sasmita, M.Hum., dan Dra. Dewi Salindri, M.Si selaku Dosen Penguji yang selalu memberikan banyak motivasi, dan membimbing penulis selama masa studi,

5. Drs. Nurhadi Sasmita, M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi motivasi dan membimbing penulis selama masa studi,
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di bangku kuliah,
7. Para Guru mulai dari TK, SDN Kladi 1, SMP Negeri 2 Cermee, dan SMA Negeri 1 Prajekan, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis,
8. Mas Heru dan segenap staf administrasi di lingkungan Universitas Jember yang telah membantu segala bentuk administrasi selama perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi,
9. Sahabat penulis Rinda, Ika, Lesti, Siva, Ariza, Nia, Luluk, dan Gofi, terimakasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan kalian,
10. Teman Kos selama penulis di Jember Ilan, Vita, Ayuni, Nopik, Vian, Karvelisa, Erna, Sulis, Sinta, Nanda dan Ida, terimakasih telah ikut memberikan semangat dan dukungan untuk penulis serta menemani penulis selama di perantauan,
11. Teman kocakku Sahwari, terimakasih sudah ikut membantu memberikan dukungan dan semangat serta ikut membantu mengoreksi skripsi penulis,
12. Terima kasih untuk seluruh anggota pegawai Pengadilan Negeri Bondowoso, terutama Ibu Nining dan Bapak Riyadi, yang telah memberikan data yang dibutuhkan penulis selama penelitian,
13. Kepala desa dan perangkat Desa Cermee, terimakasih telah memberikan data untuk penulis selama penelitian,
14. Bapak H Amirus Zamani, Edy, Sutrisno, Joko, Darlis, Hosjuto, Subakir yang telah bersedia meluangkan waktu dalam pencarian sumber,
15. Pengurus Badan Keluarga Mahasiswa Sejarah (BKMS) Universitas Jember selama penulis berproses didalamnya,

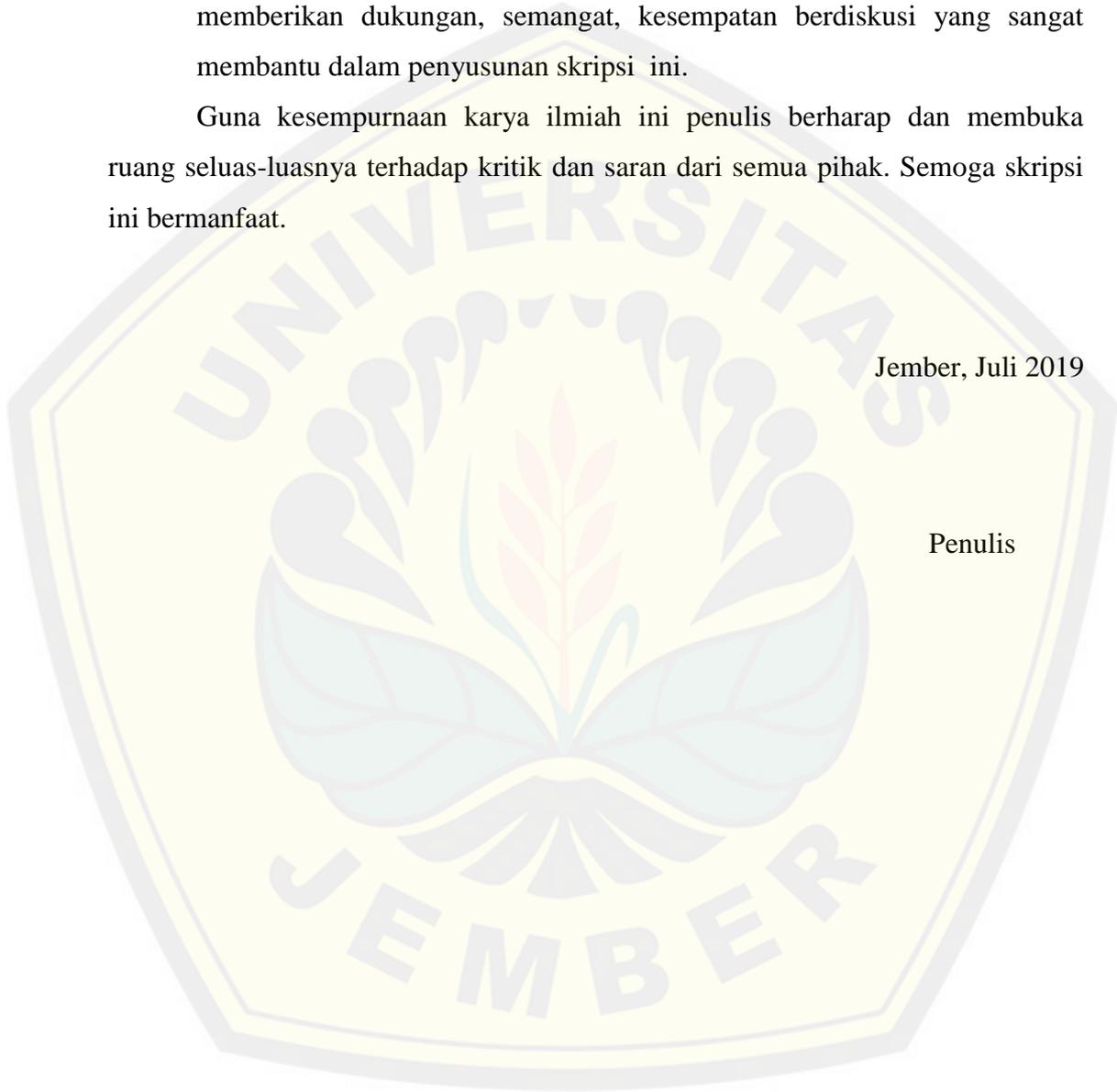
16. Terima kasih untuk Perpustakaan Unej, Perpustakaan Bondowoso, yang telah menyediakan sumber-sumber yang dibutuhkan penulis selama penulis menyusun skripsi,

17. Semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, semangat, kesempatan berdiskusi yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Guna kesempurnaan karya ilmiah ini penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Jember, Juli 2019

Penulis



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b>	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	v
<b>HALAMAN MOTTO</b>	vi
<b>PRAKATA</b>	vii
<b>DAFTAR ISI</b>	x
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	xii
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xv
<b>DAFTAR TABEL</b>	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	xvii
<b>ABSTRAK</b>	xviii
<b>ABSTRACT</b>	xix
<b>RINGKASAN</b>	xx
<b>SUMMARY</b>	xxii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat	9
1.3.1 Tujuan	9
1.3.2 Manfaat	10
1.4 Ruang Lingkup	10
1.5 Tinjauan Pustaka	12
1.6 Metode Penelitian	17
1.7 Pendekatan dan Kerangka Teori	20
1.8 Sistematika Penulisan	24

<b>BAB 2 LETAK DAN KEADAAN DESA CERMEE</b>	26
2.1 Gambaran Umum Desa Cermee	27
2.1.1 Geografi dan Demografi	32
2.1.2 Ekonomi, sosial dan Budaya	37
2.2 Sejarah Kepemimpinan Di Desa Cermee	41
2.3 Pembentukan Kepribadian Dari Dua Calon	50
2.3.1 Riwayat Hidup Sutrisno	51
2.3.2 Riwayat Hidup Edy Sukamto	55
<b>BAB 3 PROSES DEMOKRASI PILKADES CERMEE TAHUN 2015-2016</b>	59
3.1 Pembentukan Panitia Pilkades Desa Cermee	60
3.2 Pembentukan Tim Sukses	63
3.3 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cermee	66
3.4 Sebab-Sebab Kemenangan Sutrisno	69
3.5 Sebab-Sebeb Kekalahan Edy Sukamto	73
3.6 Awal Munculnya Konflik Di Desa Cermee	76
3.7 Penyelesaian Konflik Pilkades	87
3.8 Dampak Terjadinya Konflik Pilkades	93
<b>BAB 4 KESIMPULAN</b>	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	100
<b>Daftar Wawancara</b>	106
<b>Lampiran</b>	107

## DAFTAR SINGKATAN

BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BUMD	: Badan Usaha Milik Desa
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
IKSASS P2S2:	Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafi'iyah Pondok Pesantren Sukorejo
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUD	: Koperasi Unit Desa
PEMKAB	: Pemerintah Kabupaten
PEMILU	: Pemilihan Umum
PILKADES	: Pemilihan Kepala Desa
PMD	: Pemberdayaan Masyarakat Desa
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
SATPOL PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
SD	: Sekolah Dasar
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
S.H	: Sarjana Hukum
S1	: Strata 1
TK	: Taman Kanak-kanak
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TPS	: Tempat Pemungutan Suara

## DAFTAR ISTILAH

- Birokrasi : Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.
- Civil Society* : Suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, memaknai kehidupannya.
- Demo : Gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum
- Deskriminasi : Perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara.
- Destruktif : Sesuatu hal yang bersifat memusnahkan.
- Dominasi : Penguasaan terhadap pihak yang lebih kuat kepada yang lemah
- Emosional : Rasa yang penuh dengan emosi atau beremosi
- Fanatik : Kepercayaan yang kuat terhadap politik, agama dan sebagainya.
- Kepemimpinan : Seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan dalam suatu bidang sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan aktivitas bersama.
- Kepribadian : Keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen dan perilaku seseorang.
- Kewenangan : Keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.
- Koloni : Tempat yang dikuasai oleh negara lain.
- Konflik : Suatu proses sosial antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain.
- Legenda : Cerita yang dipercayai oleh beberapa penduduk setempat benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci atau sakral yang juga membedakannya dengan mite.
- Leluhur : Nama yang normalnya dikaitkan dengan orang tua.
- Mayoritas : Bagian dari suatu himpunan yang jumlah elemennya lebih dari separuh.
- Migrasi : Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain.
- Money Politic* : Suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang.
- Otonomi : Hak, wewenang dan kewajiban terhadap kepentingan pemerintahan.
- Partisipatif : Suatu gejala demokrasi yang telah direncanakan.
- Peristiwa : Sesuatu hal yang telah terjadi.
- Perkara : Suatu masalah yang terjadi.
- Perselisihan : Persengketaan yang harus diputus terlebih dahulu sebelum perkara pokok dapat diadili.
- Quorum : Jumlah minimum yang wajib hadir dalam sebuah rapat agar bisa mengesahkan sebuah keputusan.

- Religius : Suatu sikap dan perilaku yang taat terhadap ajaran agama yang dipeluknya.
- Sentralistik : Pengaturan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri.
- Silsilah : Suatu bagan yang mengungkapkan garis keturuna keluarga.
- Sosialisasi : Proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya.



**DAFTAR GAMBAR**

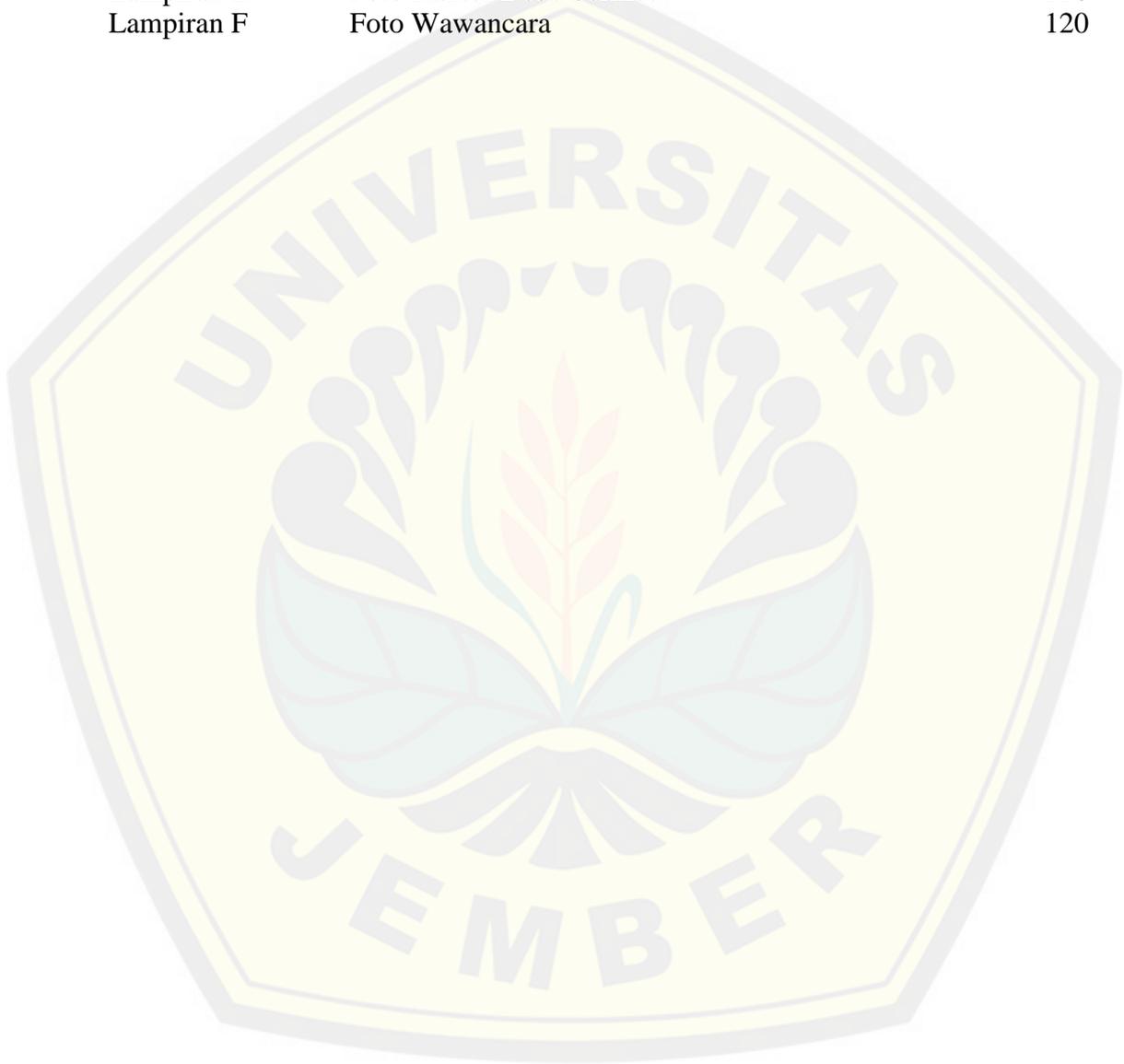
<b>Nomor</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Bondowoso	32
Gambar 2.2	Peta Desa Cermee Tahun 2007	35
Gambar 2.3	Peta Desa Cermee Tahun 2014	36
Gambar 2.4	Pengajian Rutin Setiap Bulan Sholawat Nariyah Di Cermee	39
Gambar 2.5	Foto Sutrisno	51
Gmabar 2.6	Foto Edy Sukamto	55
Gambar 3.1	Proses Pemilihan Kepala Desa	67
Gambar 3.2	Demo di Kantor Desa	83

**DAFTAR TABEL**

<b>Nomor</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Luas Tanam, Panen dan Produksi Tanaman Padi & Jagung Menurut Desa Tahun 2014	30
Tabel 2.2	Ketinggian, Luas Wilayah dan Jarak Kantor Desa Ke Kantor Kecamatan	33
Tabel 2.3	Data Jumlah Penduduk Tahun 2015-2016 Kecamatan Cermee Menurut Desa	34
Tabel 2.4	Jumlah Profesi Masyarakat Desa Cermee 2014	37
Tabel 2.5	Daftar Pemerintahan Desa Cermee	42
Tabel 3.1	Panitia Pemilihan Kepala Desa Cerrmee 2015	61
Tabel 3.2	Tim Sukses Kedua Kandidat	63
Tabel 3.3	Jumlah Perolehan Suara dari masing-masing calon Kepala Desa Cermee Tahun 2015	71

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran A	Surat Izin Penelitian	106
Lampiran B	Sumber Koran	109
Lampiran C	Ijazah Sutrisno dan Edy Sukanto	113
Lampiran D	Sumber Pengadilan Negeri Bondowoso	117
Lampiran E	Foto Kantor Desa Cerme	118
Lampiran F	Foto Wawancara	120



## ABSTRAK

Skripsi ini membahas Konflik Pemilihan Kepala Desa Cermee Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso pada tahun 2015-2016. Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik, (2) Proses terjadinya konflik pilkades, (3) Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik, (4) Dampak yang ditimbulkan dari konflik pilkades. Tujuan skripsi ini untuk mengetahui Konflik pemilihan kepala desa di Desa Cermee harus dilakukan suatu analisis dengan metode pendekatan politik dengan menekankan pada teori konflik yang mengacu pada terjadinya sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi di tingkat lokal yaitu di pedesaan. Dalam pelaksanaannya kerap diwarnai terjadinya konflik yang membuat kondisi tidak kondusif. Konflik pemilihan kepala desa terjadi pada tahun 2015. Faktor penyebab Konflik yang utama adalah ditemukannya kecurangan yang dilakukan oleh panitia pilkades. Faktor lain terjadinya perbedaan pendapat dari kedua kubu, karena masing-masing kubu sama-sama tidak ingin dikalahkan. Konflik pilkades terjadi satu hari setelah pemilihan kepala desa terlaksana. Konflik ini terjadi karena pendukung dari pihak yang kalah tidak menerima atas kecurangan yang dilakukan oleh panitia. Pendukung dari Edy Sukanto kerap melakukan aksi demonstrasi, sehingga aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Konflik tersebut, diselesaikan melalui jalur hukum, yaitu dengan melakukan perkara yang tercatat No. Perkara 29/Pdt.G/2015/PN Bdw, dari hasil keputusan perkara tersebut hakim memutuskan bahwa tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Sutrisno tetap dinyatakan menjadi kepala desa. Pilkades Desa Cermee 2015 dapat dipakai acuan untuk dapat menyelesaikan konflik pilkades di desa-desa yang lain di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pilkades, Konflik, Pedesaan.

## ABSTRACT

This study discusses the conflict over the election of the village head of Cermee, District of Cermee, Bondowoso Regency in 2015-2016. The research problems in this study are: (1) Factors that caused conflicts, (2) The process of village head election conflict, (3) Efforts made to resolve conflicts, (4) Impacts resulting from pilkades conflicts. The purpose of the study is to find out the conflict over the village head election in Cermee Village. An analysis with a political approach method is done by using conflict theory that refers to the occurrence of disputes. The results of the research show that the village head election is a form of democratic party at the local level, namely in the rural area. In practice, conflicts are often colored which make conditions not conducive. Village head election conflict occurred in 2015. The main cause of conflict was the discovery of fraud committed by the election committee. Another factor was the difference of opinion between the two camps, because each camp did not want to be defeated. Pilkades conflict occurred one day after the village head election was held. This conflict occurred because supporters of the losing party did not accept the fraud committed by the committee. The supporters of Edy Sukanto often run demonstrations, so that community activities were disrupted. The conflict was resolved through legal channels, namely by carrying out the case that was recorded No. 29 / Pdt.G / 2015 / PN Bdw. The results of the case's decision the judge decided that the defendant was not proven to have committed an illegal act. Sutrisno remained to be the village head. The 2015 Cermee Village Pilkades can be used as a reference to resolve the village head election conflict in other villages in Indonesia.

Keywords: Pilkades, Conflict, Rural.

## RINGKASAN

**Konflik Kepala Desa Cermee, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2016;** Sri Wahyuni, 140110301006;2019;Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.

Skripsi ini membahas tentang konflik kepala desa yang terjadi di Desa Cermee Kabupaten Bondowoso. Rumusan Masalah pada skripsi ini adalah Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik?, (2) Proses terjadinya konflik pilkades?, (3) Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik?, (4) Dampak yang ditimbulkan dari konflik pilkades?. Tujuan skripsi ini untuk mengetahui terjadinya konflik dan dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori konflik yang mengacu pada terjadinya sengketa.

Konflik merupakan suatu masalah yang timbul karena ada perbedaan pendapat maupun pandangan yang terjadi dalam masyarakat dan negara. Biasanya perselisihan muncul akibat tidak adanya rasa toleransi dan saling mengerti kebutuhan masing-masing individu. Masyarakat Desa Cermee di tahun 2015 mengalami perdebatan tentang konflik pemilihan kepala desa, perdebatan ini terjadi antara pendukung satu dengan yang lainnya.

Pemilihan kepala desa tidak jarang diwarnai oleh konflik dan pertentangan diantara masing-masing pendukung calon. Hal itu yang dapat menimbulkan konflik, baik konflik individu maupun konflik sosial yang pada dasarnya akan menimbulkan kerugian pada individu atau yang lainnya. Konflik tersebut terjadi karena terbentuknya dua kubu pada saat sebelum pilkades berlangsung yaitu kubu dari Sutrisno dan Edy Sukamto. Faktor lain penyebab perselisihan adalah satu hari setelah pemilihan pilkades, terjadi kecurangan yang dilakukan oleh panitia pilkades. Kecurangan tersebut terjadi karena adanya surat suara yang masih berada di luar kotak suara, seharusnya surat suara tersebut berada di dalam kotak suara. Terjadinya kecurangan ini, dapat menimbulkan terjadinya konflik antara pendukung dengan panitia pemilihan kepala desa. Adanya surat suara yang

ditemukan oleh pendukung calon kepala desa yang kalah, dijadikan bukti untuk melakukan perkara ke Pengadilan Negeri Bondowoso dengan nomor perkara 29.Pdt.G/2015/PN Bdw. Dalam perkara yang tergugat adalah ketua dan anggota panitia pilkades.

Konflik ini berdampak pada masyarakat yang ingin melakukan aktivitas sehari-hari, karena kerap terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pendukung pihak yang kalah. Aksi demonstrasi ini, terjadi karena rasa ketidakpuasan dan ketidakterimaan yang dialami oleh pihak yang kalah. Konflik dapat diselesaikan melalui jalur hukum yaitu lewat Pengadilan Negeri Bondowoso. Konflik pemilihan kepala desa ini merupakan konflik yang telah bermunculan pada saat sebelum masa reformasi, karena pemilihan kepala desa merupakan ajang pesta demokrasi bagi masyarakat desa, sehingga sangat rawan terjadi konflik.

Kesimpulannya persoalan yang terjadi di Desa Cerme, menjadi tuntutan masyarakat dan pemerintah agar dapat mengatasi dan menyelesaikan persoalan tersebut. Pemerintah dan masyarakat memiliki argumen yang berbeda, sehingga untuk memutuskan permasalahan tersebut dibutuhkan waktu dan pemikiran yang cukup lama. Pemerintah harus dapat memberikan kebijakan pada permasalahan masyarakat, karena konflik pemilihan kepala desa ini sudah kerap terjadi. Kebijakan tersebut diambil agar masalah tidak berlarut-larut dan pada akhirnya merugikan banyak pihak. Proses pemilihan kepala desa memiliki dampak positif dan negatif terhadap perkembangan masyarakat. Dampak positifnya yaitu dapat mengajarkan masyarakat tentang politik dan akan lahirnya pemimpin desa yang diinginkan masyarakat. Dampak negatif yang diakibatkan adalah rawan konflik yang terjadi apabila ada pihak yang tidak dapat menerima kealahannya.

## SUMMARY

**The Conflict of village head election of Cermee Village, Cermee District, Bondowoso Regency 2015-2016;** Sri Wahyuni, 140110301006; 2019; Department of History, Faculty of Cultural Sciences, University of Jember.

This study discusses village head conflict that occurred in Cermee Village, Bondowoso Regency. The research problems in this study are: (1) Factors that caused conflicts ?, (2) The process of village head election conflict?, (3) Efforts that were made to resolve the conflict ?, (4) The impact arising from the village head election conflict?. The purpose of this thesis is to determine the occurrence of conflict and the impact arising from the conflict. The theory used in this study is a theory of conflict that refers to the occurrence of disputes.

Conflict is a problem that arises because there are differences in opinions and views that occur in society and the state. Usually disputes arise due to a lack of tolerance and mutual understanding of the needs of each individual. The people of Cermee Village in 2015 experienced a debate about the conflict of village head election. This debate occurred between supporters of one another.

The election of village head is not infrequently colored by conflicts and contradictions between each candidate's supporters. That can lead to conflict, both individual conflict and social conflict which basically will cause harm to individuals or others. The conflict occur because the formation of two camps just before the election took place, namely the camp of Sutrisno and Edy Sukanto. Another factor causing disputes was that one day after the village head election, there was fraud committed by the election committee. The fraud occurred because of the ballots that were still outside the ballot box, the ballots should have been inside the ballot box. The occurrence of this fraud led to conflicts between supporters and the village head election committee. The existence of ballots found by supporters of the losing village head candidate, used as evidence to make the case to the Bondowoso District Court with case number 29.Pdt.G / 2015 / PN

Bdw. In the case the defendant was the chairperson and a member of the election committee.

This conflict had an impact on people who wanted to carry out daily activities, because demonstrations were often carried out by supporters of the losing party. This demonstration occurred because of the dissatisfactions experienced by the losing party. Therefore, to resolve the conflict, the supporters of the losing party took legal channels, namely through the Bondowoso District Court. This village head election conflict was a conflict that has arisen before the reform period, because the election of village head was a party of democracy for the village community, so it is very prone to conflict.

In conclusion the problems that occurred in Cermee Village demanded the community and the government to be able to overcome and resolve it. The government and the community had different arguments so that to decide the problem required quite a long time and thought. The government had to be able to provide policies on community problems, because conflicts over village head election have often occurred. The policy was taken so that the problem did not drag on and ultimately hurt many parties. The village head election process had both positive and negative impacts on community development. The positive impact was that it could teach the community about politics and the birth of a village leader desired by the community. The negative impact was that the result was prone to conflict because there were parties who cannot accept the defeat.

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Demokrasi dalam kehidupan masyarakat desa menjadi sebuah bentuk demokrasi sederhana bagi masyarakat. Memahami perkembangan demokrasi di Indonesia khususnya di masyarakat desa menjadi fokus utama dalam kajian ini. Bangsa Indonesia sejak dahulu telah mempraktikkan ide tentang demokrasi meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Menurut Bambang Istianto<sup>1</sup>, dalam perkembangannya demokrasi memiliki makna yang lebih luas bahkan tuntutan masyarakat terhadap ide demokrasi tidak hanya menyangkut aspek kekuasaan saja, akan tetapi juga nilai-nilai demokrasi dan bahkan berkembang ke arah demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi. Adapun penerapan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut baik ketika zaman Orde Lama tahun 1945-1965 pada masa ini sering disebut Demokrasi Liberal dan Orde Baru 1967-1998 pada masa Orde Baru sangat terkenal dengan sebutan demokrasi Pancasila, serta di Era Reformasi 1998 sampai sekarang banyak kalangan menyebut Demokrasi Liberal yang keablasan.

Pada Era Reformasi kata demokrasi bergema lebih nyaring dikarenakan selama rezim Orde Baru kata Demokrasi Pancasila hanya menjadi slogan sedang yang dialami oleh masyarakat adalah penekanan, ketakutan, ancaman dan otoritarian, sehingga masyarakat apatis dan cenderung apolitis. Selama Orde Baru

---

<sup>1</sup> Bambang Istianto, *Demokratisasi Birokrasi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hlm.24

dengan model pemerintahan yang sentralistis dan otoriter tersebut maka stabilitas kekuasaan dijadikan untuk memperkuat posisi bagi pemegang kekuasaan para elit dan kelompok yang berada di pusran kekuasaan. Sistem pemerintahan yang netralistik cenderung tidak demokratis, karena disamping hubungan dalam organisasi pemerintahan sangat hierarki, kritik dan beda pendapat dengan pemerintah tidak mendapat tempat. Dalam lingkungan penyelenggaraan birokrasi pemerintahan kewenangan terpusat, sering kebijakan yang bersifat *top down* disamping tidak efisien juga kurang memberikan motivasi, inovatif dan kreativitas bagi pemerintahan daerah yang berada dibawahnya.

Demokrasi juga terjadi di pedesaan, demokrasi desa merupakan demokrasi asli yang lebih dahulu terbentuk sebelum negara Indonesia berdiri, bahkan pada masa kerajaan sebelum Era Kolonial. Pola demokrasi desa yang dilambangkan oleh musyawarah dalam pencapaian keputusan dan gotong royong dalam pelaksanaan keputusannya tersebut diperkirakan dasarnya adalah sistem sosial ekonomi di masyarakat desa dan inilah yang dianggap sebagai dasar pembangunan. Desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan pemimpin. Partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilihan pemimpin di desanya itu merupakan demokrasi yang dilakukan atau terjadi di lingkungan masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan bagaimana demokrasi kepemimpinan yang terjadi di pedesaan.

Kepemimpinan merupakan hasil organisasi sosial yang telah terbentuk sebagai hasil dinamika dari interaksi sosial. Jika dilihat dalam perspektif sejarah kepemimpinan dari sudut pandang seni, dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah seni yang usianya setua usia manusia di bumi, yang sudah dipraktekkan sepanjang sejarah manusia. Dalam suatu organisasi, pasti memerlukan seseorang dengan tanpa dibantu oleh orang lain, untuk menempati posisinya sebagai pemimpin. Seseorang yang menduduki posisi pemimpin di dalam suatu organisasi mengemban tugas melaksanakan kepemimpinan. Pemimpin adalah orangnya dan kepemimpinan adalah kegiatannya.<sup>2</sup> Kepemimpinan sebagai kemampuan yang

---

<sup>2</sup>Hadari Nawawi dan M. Martini Hadari, *Kepemimpinan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006),hlm.9

mendorong sejumlah orang agar dapat bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama.

Kepemimpinan merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang berhubungan satu dengan yang lain, meskipun tidak mengikuti rangkaian yang sistematis. Rangkaian tersebut berisi tentang kegiatan yang menggerakkan, membimbing dan mengarahkan serta mengawasi orang lain dalam sesuatu baik perorangan maupun bersama-sama. Seluruh kegiatan disebut sebagai usaha mempengaruhi perasaan, pikiran dan tingkah laku orang lain kearah pencapaian suatu tujuan. Kepemimpinan juga merupakan proses interaksi antar seseorang dengan sekelompok orang lain, yang menyebabkan seorang kelompok berbuat sesuatu yang sesuai dengan kehendak pemimpin.<sup>3</sup>

Fungsi kepemimpinan yang efektif hanya akan terwujud apabila dijalankan sesuai dengan fungsinya. Fungsi kepemimpinan tersebut, berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan organisasi masing-masing yang dapat mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi. Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian di dalam situasi sosial organisasi.

Pemimpin ada yang bersifat formal dan informal. Pemimpin formal ialah orang yang oleh lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya, untuk mencapai sasaran organisasi. Pemimpin informal ialah, orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam sejarah pedesaan, desa dapat dimasukkan dalam satuan-satuan: (1) ekosistem, (2) geografis (3) ekonomis dan (4) budaya. Setiap satuan tersebut

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 72

<sup>4</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.9-10

mempunyai ciri-ciri natural yang tidak terdapat dalam satuan lainnya. Adanya hubungan antara berbagai satuan tentu saja dapat saling mempengaruhi, tetapi pengaruh tersebut selalu dapat dilihat dengan jelas dari mana datangnya.<sup>5</sup> Perhatian yang besar perlu ditingkatkan pada peningkatan pembangunan daerah pedesaan, terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat desa.

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa, dalam menjalankan tugasnya, seorang kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan beberapa perangkat desa lainnya<sup>6</sup>. Desa bersifat otonom, maka dari itu sejak jaman penjajahan Belanda, kepala desa dan perangkat desa dipilih secara langsung oleh masyarakat, baik melalui musyawarah mufakat maupun pemilihan langsung secara demokratis. Seperti Pemilu pada Era Reformasi yang pada saat itu kebebasan dibuka seluas-luasnya. Pemilihan kepala desa justru mengalami degradasi yang luar biasa. Pilkades sudah terkontaminasi oleh ulah elit politik yang sering dipertontonkan diberbagai media, sehingga putra-putri terbaik desa yang tidak punya modal, tertutup kemungkinannya untuk menjadi kepala desa. *Money politic* sudah terjadi secara masif dan terang-terangan, padahal pilkades pada zaman dahulu, berlangsung secara demokratis dan berkualitas.

Pada zaman Reformasi telah terjadi perubahan dalam proses pemilihan kepala desa. Masyarakat sudah terkontaminasi oleh ulah elit politik yang sering melakukan *money politic* untuk mencapai tujuan yang diharapkannya.<sup>7</sup> *Money politic* pada saat ini sudah terjadi secara terang-terangan. *Money politic* biasanya dilaksanakan menjelang pemilu, yakni dengan memberikan uang atau barang kepada masyarakat agar mereka dapat memilihnya, bisa diartikan *money politic* itu dimaksudkan untuk membeli suara pemilih.

---

<sup>5</sup>Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta:PT: Tiara Wacana Yogya.2003) .hlm.77

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, hlm.3

<sup>7</sup> Mohammad Solikin, <http://pilkadesgrenden2013.blogspot.com/2013/07/pemilihan-kepala-desa-dari-jaman.html?m%3D1&hl=id-ID>

Kepala desa merupakan pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang menjelaskan tentang aturan mengenai pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>8</sup> Kepala desa bertanggung jawab atas Penyelenggaraan pemerintah di desa, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dapat di perpanjang lagi untuk tiga kali.

Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan kepala-kepala dusun. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin di dalam masyarakat. Pemilihan lain dalam proses ini, ada yang kalah dan ada yang menang, dan tidak setiap kekalahan bisa diterima dengan baik. Adanya pemilihan kepala desa, merupakan praktek politik yang berada di pedesaan.

Jabatan kepala desa pada umumnya banyak diminati oleh masyarakat. Semakin meningkatnya minat masyarakat atas jabatan ini, maka potensi sengketa pasca pilkades semakin tinggi, karena salah satu penyebab timbulnya sengketa adalah tidak setiap peserta pemilihan siap untuk menerima kekalahan. Sengketa tersebut dapat menunda pelantikan kepala desa yang terpilih. Misalnya seperti yang terjadi terhadap perkembangan lokal salah satunya yaitu timbulnya konflik akibat hadirnya lembaga-lembaga baru di tingkat desa, seperti yang terjadi di Desa Cermee Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso.

Secara administratif, Desa Cermee terletak di wilayah Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Klampokan, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Suling Wetan Kecamatan Cermee. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Batu Ampar dan Desa Suling

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 22, Tahun 1948 Pasal 1, Tentang Penetapan Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Bercak Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso.<sup>9</sup> Desa Cermee berdiri pada tahun 1945, pada saat itu yang menjadi pemimpin di desa tersebut adalah Suhamina. Suhamina merupakan kepala desa pertama di Desa Cermee. Pemilihan kepala desa sebagai media yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan tatanan sosial yang demokratis. Banyak masyarakat yang apatis terhadap proses-proses politik. Namun dapat disadari bahwa dalam setiap sendi kehidupan manusia, tidak lepas dari persoalan politik. Motivasi untuk menjadi kepala desa berasal dari diri sendiri, faktor lingkungan dan faktor ekonomis, politik dan status sosial. Calon kepala desa dalam mengorganisasikan strategi menggunakan kader-kader, kader tersebut dicari dari orang-orang yang mudah bergaul dan dapat mengartikulasikan keterangan dan mempunyai kelompok kekerabatan yang banyak anggotanya. Pelaksanaan strategi persaingan dalam pemilihan kepala desa dilakukan dengan melakukan silaturahmi, menyampaikan program-program tertentu dan menggunakan *money politic*.

Desa Cermee sudah melakukan 18 kali pemilihan kepala desa. Pada sebelumnya belum pernah ada konflik pemilihan kepala desa, namun konflik tersebut terjadi pada pilkades tahun 2015. Pada tahun-tahun yang sebelumnya masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan pemilihan kepala desa, karena sumber daya manusia pada saat itu masih kurang meningkat. Dalam pemilihan kepala desa yang terjadi pada periode ini, persaingan semakin ketat, dan demokrasi semakin melekat di dalam lingkungan masyarakat, seperti yang penulis jelaskan sebelumnya.

Konflik ini terjadi pada saat pemilihan kepala desa di Desa Cermee. Konflik tersebut terjadi karena adanya dugaan kecurangan yang dilakukan panitia pemilihan kepala desa dengan ditemukannya 8 (delapan) kantong plastik logistik hasil pemungutan suara yang seharusnya kantong logistik-logistik itu disimpan

---

<sup>9</sup> Profil Desa Cermee Tahun 2015

dalam kotak suara, namun ternyata berada di luar kotak suara.<sup>10</sup> Kecurangan lain ditemukannya beberapa surat undangan pemilihan kepala desa yang belum disebar. Selain itu tim sukses pendukung Sutrisno diduga melakukan *money politic* terhadap masyarakat.<sup>11</sup> Akibat dari kecurangan tersebut, pendukung dari calon yang kalah tidak menerima atas kekalahan yang didapatkan. Selain itu panitia disangka berpihak kepada kepala desa yang terpilih.<sup>12</sup> Realitas politik semacam ini membuat masyarakat merasa tidak puas dengan proses pemilihan kepala desa. Adanya dugaan kecurangan tersebut, ratusan warga mendatangi Kapolsek Cermee Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, untuk melakukan protes yang diakibatkan adanya kecurangan dalam proses pemilihan kepala desa.<sup>13</sup> Pencalonan Sutrisno untuk kedua kalinya ini, mendapatkan dukungan tertinggi dari masyarakat Desa Cermee dan merupakan kemenangan kedua bagi Sutrisno.<sup>14</sup> Sebelumnya Sutrisno sudah menjabat kepala desa mulai tahun 2010-2015. Pada periode pencalonan kepala desa selanjutnya, Sutrisno mencalonkan kembali, sehingga ada 2 (dua) nama calon yang akan maju ke pemilihan Kepala Desa Cermee. Kedua calon tersebut yaitu: Sutrisno dan Edy Sukanto.<sup>15</sup>

Akibat konflik tersebut, ratusan warga Desa Cermee melakukan demo di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan DPRD Bondowoso. Warga tidak menerima atas hasil pemilihan kepala desa di desa mereka yang dianggap

---

<sup>10</sup>Sengketa Pilkades Warga Geruduk Kantor Polisi, (Online), <http://www.youtube.com/watch?v=IxySIvaemHg>. Diakses pada tanggal 29 April 2015, Pukul 18:49

<sup>11</sup>Kecurangan Pilkades Desa Cermee Bondowoso 2015, (online), <https://www.youtube.com/watch?v=4VzBhU0apD8>. Diakses pada tanggal 29 April 2018, Pukul 18:56

<sup>12</sup> Wawancara dengan Badrit Tamam, di Desa Cermee, Pada 25 Juli 2018

<sup>13</sup>Sengketa Pilkades Warga Geruduk Kantor Polisi, (online), <https://www.youtube.com/watch?v=IxySIvaemHg>. Diakses pada tanggal 29 April 2018, Pukul 18:49

<sup>14</sup> Wawancara dengan Sutrisno, di Desa Cermee, Pada 29 April 2018

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ayuni, di Desa Cermee, Pada 25 April 2018

penuh dengan kecurangan. Beberapa kecurigaan yang diduga dilakukan oleh panitia, antara lain panitia menggandakan undangan untuk beberapa orang yang tidak mempunyai hak pilih di Desa Cermee, namun memberikan hak suaranya di Desa Cermee. Panitia juga mengisi daftar hadir warga yang bekerja diluar daerah dan tidak dapat hadir saat pemilihan.<sup>16</sup> Polisi meminta keterangan para saksi, termasuk perangkat desa dan ketua panitia pemilihan kepala desa untuk menjelaskan kasus yang terkait 8 (delapan) kantong logistik surat suara yang masih berada diluar kotak suara. Berbekal dari bukti yang ada warga menuntut agar melakukan pemilihan kepala desa ulang, namun pihak panitia yang berada di tingkat kabupaten tidak terlalu menanggapi dugaan kecurangan pemilihan kepala desa tersebut, dan menghimbau warga untuk melakukan tuntutan ke pengadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menentukan judul **Konflik Pemilihan Kepala Desa Cermee, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2016**. Pemilihan kepala desa sebagai proses peralihan pemerintahan desa dan sebagai ajang pesta demokrasi masyarakat desa, tidak jarang diwarnai oleh konflik dan pertentangan di antara masyarakat desa, baik konflik individu maupun konflik sosial. Konflik pemilihan kepala desa yang terjadi di Desa Cermee merupakan konflik yang terjadi antara pendukung dari pihak yang kalah dengan panitia pilkades, hal ini terjadi karena adanya kesalahpahaman diantara kedua belah pihak.

Pemilihan judul skripsi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan: *Pertama*, penulis sangat tertarik dengan permasalahan yang terkait dengan pemilihan Kepala Desa Cermee, bahwa dua hari setelah pemilihan kepala desa, pendukung Edy Sukanto, menemukan beberapa dokumen surat suara yang berada diluar kotak suara yang telah ditemukan dibalai desa, dan ada lagi beberapa bukti dugaan kecurangan yaitu adanya surat undangan pemilihan kepala desa yang belum disebar. *Kedua*, penulis yakin bahwa belum ada kajian

---

<sup>16</sup>Rizqi Setiawan, Demo Tuntut Pilkades Ulang Nyaris Ricuh, (online), <http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=7885&&top=1&&ktg=J%20Tapal%20Kuda&&keyrbk=&&keyjdl=demo>. Diakses Pada 29 April 2018 Pukul 19:25

penelitian yang pernah mengulas permasalahan yang terjadi di Desa Cermee terkait pemilihan kepala desa, sehingga penulis yakin bahwa kajian di atas masih orisinal. Mengenai perbedaan penelitian yang pernah dilakukan dalam buku atau karya lain ketika mengkaji permasalahan yang sama tetapi dengan wilayah yang berbeda, tentunya menjadi salah satu rujukan yang sangat berharga untuk dijadikan bahan acuan, dengan catatan permasalahan yang pernah dikaji di atas sangat berbeda dengan kajian yang ada pada buku atau karya yang pernah ditulis oleh peneliti lainnya. *Ketiga* tersedianya akses sumber untuk mendapatkan sumber primer dan sekunder merupakan alasan utama dalam mengambil judul di atas.

## 1.2 Rumusan Masalah

Setiap kajian memerlukan rumusan untuk memperjelas alur tulisan, menulis sejarah.<sup>17</sup> Koentjaraningrat menyatakan sebuah ilmu dimulai dengan merumuskan batasan masalah yang hendak dijadikan objek. Perumusan masalah dilakukan dengan maksud menghindari penyimpangan sehingga analisisnya dapat difokuskan.<sup>18</sup>

Rumusan masalah dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik?
2. Bagaimana proses terjadinya konflik pilkades?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik?
4. Apa dampak yang ditimbulkan dari konflik pilkades?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk melacak faktor-faktor yang menyebabkan konflik pilkades

---

<sup>17</sup> Heliuss Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm.121

<sup>18</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm.4

2. Untuk mengetahui proses terjadinya konflik pilkades
3. Untuk mengetahui cara menyelesaikan pemilihan pilkades
4. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan terjadinya pilkades

### 1.2.3 Manfaat

Adapun manfaat yang didapat dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari latar belakang terjadinya pilkades, dapat diketahui manfaat teoritis dalam menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi tulisan sejenis.
2. Terjadinya dampak yang ditimbulkan dalam konflik pilkades, dapat menambah referensi penulisan tentang sejarah pilkades.
3. Dari adanya proses terjadinya konflik, dapat dijadikan sebagai pijakan bagi pemerintah desa maupun pusat untuk menentukan kebijakan agar tidak terjadi konflik serupa.
4. Dari tujuan penulis meneliti konflik pilkades, dapat bermanfaat bagi pemerintah dan generasi muda untuk mengetahui tentang politik demokrasi yang terjadi di desa.

### 1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan tentang konflik pemilihan kepala desa dibagi dalam *skope* spasial, *skope* temporal, dan ruang lingkup kajian. Pada dasarnya dalam penulisan ruang lingkup harus menunjukkan secara jelas lingkup penelitiannya, baik lingkup spasial (ruang geografis), lingkup temporal (waktu), dan lingkup kajian (prespektif).<sup>19</sup>

Lingkup Spasial merupakan batasan yang didasarkan pada kesatuan wilayah geografis atau satuan wilayah administrasi tertentu. Lingkup temporal adalah batasan waktu yang ditetapkan dalam penelitian. Sedangkan lingkup kajian merupakan batasan aspek-aspek yang dapat dianalisis dalam suatu penelitian sejarah. Dalam penulisan skripsi ini, lingkup spasialnya yang ditentukan adalah

---

<sup>19</sup> Nurhadi Sasmita, *et all*, *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Ilmu Budaya Universitas Jember*, (Yogyakarta: Lembah Mana, 2012), hlm.19

Desa Cermee, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso. Lingkup temporalnya pada tahun 2015-2016, dan lingkup kajiannya adalah sejarah lokal atau sejarah pedesaan.

Pemilihan Lingkup Spasial Desa Cermee, pada tahun 2015 Desa Cermee memiliki jumlah komunitas pemukiman penduduk dengan 5.953 jiwa, Laki-laki 2.928 dan Perempuan 3.025 jiwa. Desa Cermee dimulai sejak tahun 1945 dengan kepala desa pertama kali yaitu Bapak Suhamina. Pada periode 2015 terbentuk pemilihan kepala desa dengan calon Sutrisno dan Edy Sukanto, Sutrisno sebelumnya sudah pernah menjabat Kepala Desa pada periode 2010-2015, pada periode selanjutnya Sutrisno mencalonkan kembali. Pada saat Pemilihan Kepala Desa ada ketidakpuasan yang ditampakkan oleh pendukung Edy Sukanto, setelah mengetahui Sutrisno dinyatakan menjadi kepala desa, rasa ketidakpuasan pendukung pihak yang kalah semakin besar, sehingga pendukung pihak yang kalah tidak menerima atas kekalahannya dan menduga panitia melakukan kecurangan. Pendukung Edy Sukanto terus mencari bukti atas kecurangan tersebut, sehingga ia dapat menemukan bukti yaitu ditemukannya beberapa surat suara yang seharusnya berada di kotak suara masih terletak di luar kotak suara, sehingga kasus ini ditindaklanjuti pihak yang berwajib.

Pemilihan Lingkup Temporal 2015-2016, karena Juni 2015 merupakan tahun menjelang pemilihan kepala desa yang menimbulkan konflik. Dalam pemilihan kepala desa dimenangkan oleh Sutrisno yang menjabat sebagai kepala desa yang sebelumnya. Pada 2016 merupakan terselesaikannya kasus perkara gugatan yang dilakukan oleh pendukung pihak yang kalah. Pada awalnya masih belum ada yang menerima atas kemenangan yang didapatkan oleh Sutrisno, namun pada saat mengetahui hasil putusan persidangan bahwa kemenangan tetap di tangan beliau, pendukung yang kalah berusaha menerima atas kemenangan yang didapatkan Sutrisno.

Lingkup Kajian Skripsi ini, termasuk kategori Sejarah Pedesaan. Dalam buku karangan I Gde Wija yang berjudul Sejarah Lokal Suatu Perspektif Dalam Pengajaran Sejarah. Sartono Kartodirdjo mengemukakan bahwa sebenarnya sejarah pedesaan adalah bagian dari sejarah sosial, karena masalah pedesaan

hakekatnya satu aspek saja dari kehidupan masyarakat secara keseluruhan.<sup>20</sup> Skripsi ini dapat disebut demikian, karena peristiwa ini terjadi di suatu desa dan menyangkut pemilihan kepala desa termasuk politik tingkat lokal atau hanya termasuk politik lokal. Menurut Kuntowijoyo mengenai Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Daerah (Perda), Pemilihan Bupati, Pemilihan Walikota, Pemilihan Gubernur, Pemilu, dan Aktivitas Partai-partai dapat termasuk politik tingkat lokal, atau hanya politik lokal.<sup>21</sup> Dinamika politik desa terkadang lain dengan dinamika politik di tingkat nasional. Politik tidak selalu harus berganti gerakan politik formal, tetapi dapat merupakan fraksi-fraksi perorangan atau keluarga. Seperti Pemilihan Kepala Desa misalnya, seorang calon Kepala Desa dianggap sebagai kekuatan politik di tingkat desa.

### 1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah mengulas atau meninjau bahan-bahan pustaka yang memiliki relevansi terhadap pokok materi penelitian. Bahan-bahan yang ditinjau dapat berupa buku teks, hasil penelitian, maupun artikel ilmiah. Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis mengenai isi buku, hasil penelitian atau pemikiran peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Mengenai tingkat orisinalitas karya tulis, keabsahan suatu karya tulis ilmiah yang berbasis pada ilmu pengetahuan, harus dapat didukung dengan adanya perbandingan-perbandingan yang memaparkan dalam sudut pandang apa karya tersebut dihasilkan dan menunjukkan letak perbedaan dan orisinalitas dari karya lainnya. Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis mengenai isi buku, hasil penelitian atau pemikiran peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu juga dapat ditunjukkan perbedaan antara karya yang ditinjau dengan

---

<sup>20</sup> I Gde Widja, *Sejarah Lokal Perspektif Dalam Pengajaran Sejarah*, (Bandung: Angkasa, 1991), hlm.83

<sup>21</sup> Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm.185

penelitian yang dilakukan berbeda dengan buku atau hasil penelitian terdahulu, sehingga tampak aspek orisinalitasnya.<sup>22</sup>

Sumber literatur yang dijadikan rujukan adalah yang *pertama*, berupa skripsi yang berjudul “Konflik Pemilihan Kepala Desa Kampunganyar Glagah Banyuwangi Tahun 2007-2010” oleh Wuri Windayati. Dalam karyanya Wuri Windayati mengupas tentang konflik yang terjadi, yang membuat kondisi Desa Kampunganyar menjelang pemilihan mengalami ketegangan, yaitu Kantor Kepala Desa Kampunganyar dibakar oleh oknum warga. Kondisi tersebut dipicu karena kekecewaan masyarakat terhadap persiapan pilkades dan sikap salah satu calon yang tidak konsisten dengan ucapannya sendiri. Kekecewaan tersebut, kemudian ditunjukkan dengan sikap anarki yaitu dengan cara merusak fasilitas umum yaitu membakar fasilitas Kantor Kepala Desa Kampunganyar. Upaya penyelidikan terkait masalah ini masyarakat dibantu oleh Aparat Kepolisian Banyuwangi, Guna untuk penyelidikan lebih lanjut, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menemukan kejelasan dari kejadian ini, sehingga diperoleh bukti yang jelas.<sup>23</sup>

Jika dibandingkan dengan kajian skripsi penulis, Kajian Wuri Windayanti sama-sama membahas tentang permasalahan pemilihan kepala desa, terkait dengan isu-isu kecurangan seperti *money politic* dan terdapat surat suara yang tidak sah serta kecurangan dalam pemungutan surat suara. Sama menggunakan model penulisan deskriptif analitis yaitu, studi lapang yang dilakukan dengan cara wawancara secara lebih mendalam (*indepth interview*). Dalam kajian ini lebih lengkap dalam membahas permasalahan dengan menekankan sifat diakronis yaitu, mempertimbangkan perkembangan waktu yang menjadi kekhasan sejarah. Perbedaannya juga terletak pada pembahasan yang berada dalam skripsi Wuri, konflik yang terjadi karena adanya pembakaran sebelum terjadi pemilihan kepala desa, namun proses tersebut, masih terlaksana dengan baik. Kasus penulis yaitu adanya kecurangan yang dilakukan Panitia, sehingga pendukung lawan

---

<sup>22</sup> Nurhadi Sasmita, *op.cit.*, hlm.19

<sup>23</sup> Wuri Windayati, “Konflik Pemilihan Kepala Desa Kampunganyar Glagah Banyuwangi Tahun 2007-2010”, *Skripsi* Program Studi Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember, 2015, hlm.68

melakukan aksi demo dan memperkarakan kasus tersebut. Kesamaan dalam tulisan ini yaitu sama-sama menulis tentang Konflik Pemilihan Kepala Desa.

Karya kedua merupakan skripsi yang ditulis oleh Anita Risky Wardhani, yang berjudul Konflik Pilkades Di Desa Selogudig Wetan Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo. Dalam kajiannya Anita menjelaskan tentang adanya kecemburuan calon kepala desa, adanya kecurangan surat suara karena salah satu seorang pendukung kepala desa kehilangan kartu pemilihan dan surat undangan, yang menjadi persoalan dalam kasus ini pihak yang kalah tidak siap menerima kealahannya. Kasus lain yang ditemukan dalam konflik tersebut dengan adanya pemaksaan terhadap penduduk yang mempunyai hak pilih untuk memilih salah satu calon kepala desa. Pemaksaan tersebut dilakukan oleh tim sukses dan atau yang mempunyai kedekatan sosial dengan cara melebih-lebihkan kesuksesan calon yang diusung. Kemudian ada bentuk ancaman kekerasan fisik, ancaman keselamatan harta bendanya, dan ancaman akan dipersulit dalam segala urusannya kalau seandainya calon kepala desa yang diusung menang. Adanya tawuran antar tim sukses pendukung calon kepala desa yang mengakibatkan beberapa korban terluka dan polisi meringkus sepuluh orang untuk dimintai keterangan.<sup>24</sup>

Kesamaan terhadap kajian skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang konflik pemilihan kepala desa, yang mengulas tentang dampak dari konflik tersebut hingga cara penyelesaian konflik tersebut. Perbedaan dalam penulisan skripsi yang ditulis oleh Anita dalam pengumpulan sumber berbeda dengan kajian penulis, kajian Anita menggunakan perspektif sosial yang meliputi pengumpulan data, keabsahan data dan analisis data. Skripsi yang ditulis oleh penulis menggunakan metode diskriptif analitis, secara keseluruhan lebih lengkap dalam membahas permasalahan dengan menekankan sifat diakronis yaitu, mempertimbangkan perkembangan waktu yang menjadi kekhasan sejarah, sehingga akan terlihat aspek orisinalitas karya dan lebih menarik bahwa belum

---

<sup>24</sup>Anita Risky Wardhani, "Konflik Pilkades Di Desa Selogudig Wetan Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Probolinggo", *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Sosiologi Universitas Jember, 2012, hlm.50

pernah ada kajian yang sama-sama membahas tentang permasalahan yang sedang dikaji oleh penulis.

Kajian yang ketiga merupakan skripsi dari Alvin Eka Trijayanto tentang penyelesaian sengketa pilkades. Persoalan awal akibat terjadinya konflik, panitia pilkades melakukan kecurangan saat dilakukan penghitungan suara. Jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilihan tetap, sebesar 7.310 suara. Dari panitia pemilihan kepala desa data undangan yang hadir berjumlah 5.930 pemilih dan setelah dilakukan penghitungan suara jumlah surat suara dicoblos 6.044 suara sehingga panitia dan para calon menganggap terjadi penggelembungan suara sebanyak 114 suara. Atas kesepakatan internal calon kades, maka kelebihan suara sebesar 114 tersebut akhirnya dibakar, dengan metode secara acak.<sup>25</sup>

Kesamaan kajian yang ditulis Alvin dengan kajian penulis yaitu sama-sama berkaitan dengan konflik pemilihan kepala desa, yang dimana di dalam pemilihan kepala desa tersebut telah terjadi kecurangan dalam surat suara yang diperoleh para calon kepala desa. Perbedaan kajian Alvin lebih menggunakan perspektif ilmu hukum untuk menjelaskan dan mengupas fenomena tersebut, dimana ia lebih menekankan pada undang-undang hukum terkait dengan peraturan desa yakni pendekatan perundang-undangan (Statute approach), dan kajian yang ditulis oleh penulis yakni menggunakan metode deskriptif analitis yaitu, studi lapang yang dilakukan dengan cara wawancara secara lebih mendalam (indepth interview).

Kajian ke empat, buku yang berjudul *Elit Lokal dan Civil Society* karya Yusron. Buku ini membahas tentang peran *Civil Society* dan hubungannya dengan masyarakat lokal. Hubungan negara, masyarakat, dan *Civil Society* ditunjukkan dalam pemilihan kepala desa 1999 yang berlangsung di Desa Silir Kediri.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Alvin Eka Trijayanto, “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember (Analisis Yuridis Terhadap Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015, Hlm.2

<sup>26</sup> Yusron, *Elit Lokal Dan Civil Society*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009), hlm.43

Yusron dalam hal ini berusaha menunjukkan kondisi politik yang tengah terjadi di Silir KEdyri dengan mengamati masyarakat secara keseluruhan. Implikasi nyata dalam pemilihan kepala desa tersebut yaitu, masyarakat dan *Civil Society* menunjukkan sikapnya untuk melawan kekuasaan otoriter dalam Pemilihan Kepala Desa, dimana masyarakat tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait Pemilihan Kepala Desa yang dianggap cacat hukum. Masyarakat merasa tuntutan mereka tidak diwujudkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah tetap menjalankan pemilihan kepala desa, namun masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa yang ditunjukkan dengan meminimalisasi partisipasi dengan cara golput (Golongan Putih). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kekuasaan yang sentralistik yakni munculnya perlawanan terhadapnya.

Permasalahan di atas apabila dihubungkan dengan kasus yang sedang saya tulis menunjukkan sikap masyarakat yang sama-sama menentang atau merasa tidak puas dengan proses pemilihan kepala desa, namun dalam kasus yang saya tulis pendukung yang kalah melampiaskan ketidakpuasannya dengan cara berdemo dan melaporkan ke Pengadilan Negeri Bondowoso karena ada kecurangan dalam pemungutan surat suara. Hal ini menunjukkan bahwa, proses pemilihan kepala desa di setiap wilayah atau daerah masih saja diwarnai dengan aksi-aksi yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang calon pemimpin atau bisa disebut melakukan pesta demokrasi namun dengan cara yang tidak berkualitas. Seperti aksi penyuaipan dan lain sebagainya. Permasalahan ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi di negara ini masih sangat lemah dan adanya *money politic*. Selain itu terlihat tidak adanya ketegasan hukum yang baik dari pihak yang berwenang menangani hal-hal seperti itu.

Penjelasan sumber-sumber pustaka di atas, dalam skripsi ini menjelaskan kondisi politik yang mewarnai pemilihan kepala desa yang berlangsung di beberapa wilayah. Realitasnya, masih diwarnai dengan isu-isu kecurangan masyarakat seperti, *money politic*, penggelembungan hasil suara, dan surat suara yang tidak sah dimana tidak terdapat tanda tangan dan stempel panitia. Hal tersebut menunjukkan bahwa perpolitikan di Indonesia terutama politik lokal

masih banyak diwarnai oleh isu-isu kecurangan. Seperti kajian yang dihasilkan oleh: Wuri Windayanti, Anita Risky Wardhani, Alvin Eka Trijayanto, dan Yusron, tentang permasalahan pemilihan kepala desa.

### 1.6 Metode Penelitian

Pada umumnya yang dinamakan metode adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk mendapatkan obyek. Metode sejarah adalah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi, dan penyajian sejarah, misalnya sejarah kuantitatif dan lisan.<sup>27</sup> Metode sejarah selalu erat kaitannya dengan prosedur, proses, atau teknis yang sistematis untuk melakukan penelitian disiplin tertentu, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan obyek penelitian.<sup>28</sup> Menurut Mohammad Hadi Sundoro, metode sejarah dapat memberikan banyak hal, dapat diterapkan dalam pokok pembahasan disiplin ilmu maupun sebagai sarana untuk memastikan fakta. Metode sejarah merupakan makna utama bagi sejarah, lewat metode sejarah kita dapat mengetahui bagaimanakah pengaruh pemikir, sifat universal metode sejarah.<sup>29</sup>

Penulisan sejarah para sejarawan juga mempunyai suatu metode yang dibagi dalam tahapan karya tulis sejarah. Metode yang digunakan adalah metode sejarah. Menurut Louis Gottschalk metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis dengan kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Proses yang akan menggambarkan kembali peristiwa masa lampau dengan data yang diperoleh, dengan sumber-sumber yang akan menunjang penulisan sebuah karya ilmiah.<sup>30</sup> Kuntowijoyo membagi langkah-langkah penelitian sejarah ke dalam lima tahapan, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi

---

<sup>27</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta:PT. Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm.1

<sup>28</sup> Suhartono W Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.11

<sup>29</sup> Muhammad Hadi Sundoro, *Keniscayaan Sejarah*, (Jember: UPT Perpustakaan Unej, 2013), hlm.31

<sup>30</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press, 1975), hlm.32

(kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi, analisis dan sintesis, (5) penulisan.<sup>31</sup>

Pemilihan topik merupakan langkah yang pertama dalam metode sejarah. Dalam kajian ini, topik yang dipilih adalah konflik pemilihan kepala desa yang terletak di Desa Cermee, Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso. Pemilihan topik ini didasarkan pada ketertarikan diri penulis dengan masalah konflik pemilihan kepala desa. Hal yang terjadi setelah pemilihan kepala desa selesai, ada ketidakpuasan antara para pendukung setiap calon kepala desa terhadap hasil perolehan suara pemilihan kepala desa. Akibat kesalahpahaman tersebut terjadi konflik antar pendukung calon kepala desa, sehingga masing-masing pendukung dari calon tersebut melakukan demo aksi ke Kantor Pemkab, karena telah terjadi kecurangan dalam pemungutan suara.<sup>32</sup>

Tahap yang kedua merupakan pengumpulan sumber. Sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber primer dan sumber sekunder.<sup>33</sup> Sumber primer merupakan sumber pertama yang berupa tulisan atau sumber lisan asli dari peristiwa sejarah.<sup>34</sup> Sumber primer dapat berupa dokumen dan arsip yang bisa didapatkan oleh penulis, seperti misalnya Arsip Panitia Pemilihan Kepala Desa, Perda, Perbup dan foto, arsip tersebut didapat dari kantor desa. Selain sumber tertulis sumber primer juga didapatkan menggunakan metode wawancara. Sumber lisan digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang konflik pemilihan kepala desa melalui metode wawancara. Wawancara tersebut dilakukan dengan pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan menguasai hal yang berkaitan dengan peristiwa yang ditulis, yaitu tentang pihak yang menang dan kalah dalam pemilihan kepala desa. Selain sumber primer peneliti juga menggunakan sumber sekunder, sumber sekunder merupakan sumber pendukung

---

<sup>31</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Benteng, 2015), hlm.32

<sup>32</sup> Lihat Lampiran B No.4, *Radar Ijen*, "Tuntut Pilkades Ulang", 9 Juni 2015

<sup>33</sup> Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm.35

<sup>34</sup> Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm.83

dari sumber primer.<sup>35</sup> Sumber sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan buku literatur yang memiliki kaitan seperti pembahasan tesis, skripsi, buku-buku koleksi Perpustakaan Universitas Jember, Perpustakaan Daerah Bondowoso, Pengadilan Negeri Bondowoso, dan Kantor Desa Cermee. Sumber sekunder diperoleh dengan dua cara yaitu literatur atau kepustakaan dan wawancara.

Data yang diperoleh kemudian diverifikasi, yang merupakan kritik sejarah atau keabsahan sumber dalam memverifikasi data ada dua macam, yaitu autentisitas (kritik internal), dan kredibilitas (kritik eksternal) sumber dari fakta-fakta sejarah yang terkumpul.<sup>36</sup> Autentisitas atau keaslian sumber berguna untuk melihat kebenaran dari sumber yang sudah didapatkan, sedangkan kredibilitas sumber dimana seorang sejarawan setelah mendapatkan data harus memilih dan membandingkan data yang sudah kita dapat, tidak langsung memasukkannya.<sup>37</sup>

Setelah melakukan kritik internal atau eksternal atas berbagai sumber yang telah diperoleh dan membandingkan, serta juga menyeleksi data, maka secara teoritik telah ditemukan fakta sejarah. Fakta sejarah yang terkandung dalam sumber, pada dasarnya dapat membedakan antara fakta yang sudah jelas kebenarannya atau lazim disebut *hard fact*, dan fakta yang perlu diteliti kebenarannya atau lazim dinamakan *cold fact*.<sup>38</sup> Fakta ini kemudian diinterpretasikan. Interpretasi merupakan suatu analisis dan sintesis, dimana sebagai seorang penulis harus bisa menguraikan apa yang sudah didapat dari penelitian dengan menyatukan data yang sudah didapatkan.<sup>39</sup>

Tahapan yang terakhir adalah historiografi merupakan pengaplikasian dari yang sudah kita dapat dilapangan mulai sumber tertulis juga sumber lisan yang sudah diperoleh. Penulisan merupakan proses menyusun suatu pengetahuan

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm.84

<sup>36</sup> Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm.98

<sup>37</sup> Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm.100-101

<sup>38</sup> MR. Sjarifudin Prawiranegara, *Sejarah Sebagai Pedoman Untuk Membangun Masa Depan*, (Jakarta: PT. Inti Idayu Press, 1981), hlm.10

<sup>39</sup>Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm.102-104

sejarah yang bisa dibaca orang lain dan dalam penulisannya para sejarawan harus bersikap subyektif mungkin dan menghilangkan sikap subyektif. Historiografi dalam ilmu sejarah merupakan titik puncak seluruh kegiatan penelitian sejarawan. Dalam metodologi sejarah, historiografi merupakan bagian terakhir.<sup>40</sup> Selain terdapat metode *oral history* atau sejarah lisan yang mempunyai banyak kegunaan sebagai metode yang digunakan sebagai dokumentasi dan metode pelengkap terhadap memperoleh sumber-sumber sejarah.<sup>41</sup>

### 1.7 Pendekatan dan Kerangka Teori

Untuk penulisan sejarah diperlukan ilmu bantu untuk dapat mengungkap sejarah sesuai dengan jiwa zamannya. Sejarah dapat diartikan peristiwa masa lampau, aktualitas masa lampau, rekaman atau jejak peninggalan, proses atau teknik merupakan ilmu yang diakronis (perkembangan waktu) yang meneliti gejala-gejala yang memanjang dalam waktu tetapi dalam ruang yang terbatas.<sup>42</sup>

Dibutuhkannya pendekatan dan kerangka teori untuk dapat mendeskripsikan suatu peristiwa yang akan ditulisnya. Adapun fungsi dari pendekatan adalah dari segi mana kita akan mengungkap suatu peristiwa, dan dimensi mana yang akan dikhususkan oleh peneliti. Fungsi kerangka teori untuk mempertegas suatu analisis dari penulis, serta dapat mempermudah penulis dalam menentukan sumber sejarah yang relevan sesuai dengan kajian masing-masing.

Para ahli dalam bidang metodologi sejarah, sering kali menyatakan bahwa untuk mempermudah sejarawan dalam pengkajiannya terhadap peristiwa masa lampau akan selalu membutuhkan kerangka teori dan konsep, keduanya berfungsi sebagai ilmu alat-alat analisis serta sintesis sejarah.<sup>43</sup> Konsep dan teori dapat

---

<sup>40</sup> MR. Sjarifuddin Prawiranegara, *op.cit.*, hlm.31

<sup>41</sup> Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm.26-28

<sup>42</sup> Mohammad Hadi Sundoro, *Teka-Teki Sejarah*, (Jember: Jember University, 2009), hlm.4

<sup>43</sup> Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz MEhya, 2007), hlm.31

dipinjam dari ilmu-ilmu lain, seperti sosiologi, antropologi, dan politikologi. Sejarah dan sosiologi seharusnya sangat akrab, sebab para praktisi dari kedua disiplin ilmu ini mencoba atau seharusnya mengamati pengalaman-pengalaman manusia sebagai suatu kesatuan.<sup>44</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini, adalah pendekatan politik. Politik merupakan salah satu ilmu bantu dalam kajian sejarah menyangkut aspek kajian kekuasaan pada umumnya.<sup>45</sup> Kekuasaan merupakan konsep yang begitu terbuka sehingga tidak mungkin mengedepankan pengertian tunggal. Pemahaman tentang kekuasaan selalu berkembang berdasarkan ruang waktu.<sup>46</sup> Politik sebagai studi kelembagaan yang sebagai objeknya negara, negara disini dilihat sebagai suatu lembaga yang dibentuk dalam masyarakat.<sup>47</sup> Pada dasarnya kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* untuk menyebut pengertian negara atau negara kota, menurut Plato, *Politeia* digunakan untuk menamakan hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan.<sup>48</sup> Istilah politik dapat menyangkut suatu seni untuk dapat mengatur dan mengurus negara atau ilmu kenegaraan. Menurut George Washington politik merupakan sistem kekuasaan yang di dalamnya tidak boleh terdapat kekuasaan yang mutlak, melainkan harus ada perpindahan kekuasaan secara damai.<sup>49</sup>

Ilmu politik erat kaitannya dengan sejarah. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik. Oleh karena itu dapat menyumbang bahan, yaitu

---

<sup>44</sup> Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial* terjemahan Yayasan Obor Indonesia, (Jakarta: Adikarya Ikapi Program Pustaka, 2001), hlm.25

<sup>45</sup> Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm.185

<sup>46</sup> Zainuddin Maliki, *Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan Dan Transformasi Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm.5

<sup>47</sup> P Anthonius Sitepu, *Teori-teori Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm.4

<sup>48</sup> Telly Sumbu, *et all, Kamus Umum dan Politik Hukum*, (Jakarta: Jalan Permata Aksara, 2010), hlm.639

<sup>49</sup> Imam Hidajat, *Teori-teori Politik*, (Malang: Setara Press, 2009), hlm.3

data dan fakta dari masa yang lampau, untuk diolah lebih lanjut.<sup>50</sup> Seperti yang penulis teliti, yaitu tentang politik desa yang pernah terjadi sebelumnya. Pada politik desa, seperti adanya pemilihan kepala desa, masyarakat memiliki andil atau hak untuk menentukan siapa yang pantas untuk memimpin desanya. Selain dipilih oleh bupati, kepala desa juga wajib dipilih oleh masyarakat, agar tidak tiba-tiba menjadi kepala desa. Masyarakat dalam suatu desa juga patut diperhitungkan, karena suara masyarakat dapat menjadi pembantu untuk melengkapi proses pemilihan kepala desa tersebut, sekaligus sebagai penentu kemenangan para calon.

Sebagai pengkajian skripsi ini lebih dalam, penulis perlu menggunakan teori agar mendapatkan berbagai pertanyaan yang dapat digunakan dalam menggali informasi terhadap fenomena yang diteliti. Teori yang digunakan dalam skripsi ini, adalah teori konflik. Konflik merupakan suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang dimana salah satu pihak menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik berasal dari bahasa Latin *Configere* yang berarti saling memukul. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan tersebut di antaranya yaitu menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Konflik juga merupakan suatu unsur terpenting dalam kehidupan manusia, akan tetapi dapat memberikan dampak yang cukup serius dalam berbagai kehidupan. Konflik dapat dikatakan sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan, bermaksud untuk menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. Konflik juga dapat diartikan sebagai aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial.<sup>51</sup> Dalam buku karangan Dean G Pruitt, Webster mengatakan istilah *Conflict* di

---

<sup>50</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT GramEdya Pustaka Utama, 1977), hlm.17

<sup>51</sup> Hugh Miall, *et all*, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.7

dalam bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak.<sup>52</sup>

Setiap masyarakat mempunyai suatu sistem politik perangkat pemerintahan dan praktek-praktek politik. Konflik-konflik politik dan keputusan konsepsi keagamaan dan ritual-ritual dan semua atau bahkan hampir semua anggota-anggota masyarakat yang telah dewasa dapat mengambil bagian di dalam aktivitas-aktivitas ini tanpa adanya sekelompok orang tertentu yang menggugat tanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas tersebut.<sup>53</sup> Dalam teori konflik ini yang ditekankan justru pertentangan, hubungan superordinasi dan subordinasi, perbedaan kekuasaan dan perubahan sosial. Teori ini berakar pada jalan Karl Marx (konflik kelas), di samping itu terkait pula dengan apa yang pernah dipikirkan oleh Max Weber. Dalam teori ini masyarakat dilihat sebagai suatu yang selalu berubah, terutama sebagai akibat dari dinamika pemegang kekuasaan yang terus berusaha memelihara dan meningkatkan posisinya.<sup>54</sup>

Pihak-pihak yang bertikai biasanya cenderung melihat kepentingan mereka sebagai kepentingan yang bertentangan secara diametrikal. Hasil yang mungkin diperoleh adalah hasil kalah menang (satu pihak menang, pihak yang kalah) atau kompromi (mereka membagi perbedaan-perbedaan yang ada). Pada dasarnya ada banyak hasil yang sama dalam konflik dengan kekerasan keduanya sama-sama kalah. Jika tidak ada yang mampu memaksakan sebuah hasil atau bersedia untuk kompromi, pihak yang bertikai dapat memaksakan biaya yang sangat besar pada masing-masing pihak dimana pada akhirnya semua pihak berakhir dalam keadaan lebih buruk dibanding dengan jika mereka menggunakan strategi yang lain. Analisis penyelesaian konflik ditemukan bahwa hal ini

---

<sup>52</sup> Dean G Pruitt, *et all, Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.9

<sup>53</sup> Tom Bottomore, *Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.69

<sup>54</sup> Sunyoto Usman, *Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.54

merupakan hasil yang sering muncul daripada yang diharapkan.<sup>55</sup> Bentuk-bentuk konflik dapat berupa senjata-senjata pertempuran, kekerasan fisik dan dapat melibatkan militer untuk suatu keamanan dan penyelesaian masalah.<sup>56</sup>

Konflik berakar dari faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan agama, hal tersebut bisa terkait dengan masalah ketidakadilan, pencaplokan suatu wilayah, dan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>57</sup> Permasalahan yang ditulis dalam skripsi ini, adalah adanya persaingan di antara kedua calon. Salah satu calon merupakan mantan kepala desa yang sebelumnya dan kembali mencalonkan diri. Kedua calon yang memiliki pendukung banyak yaitu kelompok Sutrisno, selain memiliki dukungan dari masyarakat, juga memiliki dukungan dari keluarga, dan kerabat dekat. Calon yang lain juga memiliki pendukung banyak masih kalah dengan pendukung Sutrisno. Akibat persaingan di antara pendukung calon kepala desa tersebut, menimbulkan suatu konflik yang membuat para pendukungnya kesal terhadap perolehan suara dari hasil pemilihan.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab 1, bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 merupakan letak dan keadaan Desa Cermee yang meliputi kondisi gambaran umum Desa Cermee, geografi dan demografi, ekonomi sosial dan budaya, sejarah kepemimpinan Desa Cermee, pembentukan kepribadian dari kedua calon, riwayat hidup Sutrisno, riwayat hidup Edy Sukamto.

---

<sup>55</sup>Diana Francis, *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Quills, 2006), hlm.57

<sup>56</sup> Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT Raja Grafindom Persada, 1996), hlm.280

<sup>57</sup> Ainur Rofiq, *Tafsir Resolusi Konflik*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm.26

Bab 3, membahas tentang proses demokrasi pilkades Cermee tahun 2015-2016 yang mencakup awal munculnya konflik di Desa Cermee, pelaksanaan pemilihan kepala desa Cermee, pembentukan panitia pilkades, pembentukan tim sukses kedua calon pilkades, sebab-sebab kemenangan Sutrisno, sebab-sebab kekalahan Edy Sukanto, penyelesaian konflik pilkades, dan dampak terjadinya konflik pilkades.

Bab 4 berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan bab-bab terdahulu, dan sekaligus menjadi penutup penulisan ini.



## **BAB 2**

### **LETAK DAN KEADAAN DESA CERMEE**

Bagian ini mengkaji tentang permasalahan politik yang terjadi di tingkat lokal, yaitu di Desa Cermee Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso. Penulis akan menggambarkan tentang letak dan keadaan Desa Cermee yang meliputi jumlah perkembangan penduduk Desa Cermee, tingkat pendidikan, serta kekayaan dalam bentuk kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat Desa Cermee, serta berkaitan dengan potensi desa tersebut. Kedua yaitu sejarah kepemimpinan di Desa Cermee, meliputi tentang silsilah kepala desa yang ada di Desa Cermee, dari pertama adanya pemilihan kepala desa sampai pada masa kepemimpinan yang sekarang yaitu masa Sutrisno menjadi pemimpin di Desa Cermee. Dalam permasalahan yang kedua ini membahas tentang keturunan yang berkaitan dengan mantan atau pejabat kepala desa. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang faktor kepribadian dua calon, dalam permasalahan ini penulis berusaha membahas tentang biografi dari masing-masing calon. Riwayat hidup dari kedua calon tersebut sangatlah penting, serta pendidikan dari dua calon. Pembahasan ini diperlukan untuk memberi latar belakang bagi proses historis yang disajikan dalam bab berikutnya.

## 2.1 Gambaran Umum Desa Cermee

Cermee merupakan sebuah nama desa di wilayah Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso. Masyarakat Desa Cermee hingga saat ini masih mempercayai legenda yang ada, jauh dari sebelum masyarakat menempati desa tersebut. Hiduplah seseorang yang memiliki peran penting terhadap berdirinya Desa Cermee, seseorang tersebut adalah orang pertama yang telah memberikan nama Desa Cermee, yang sampai saat ini masih diyakini oleh masyarakat setempat yaitu, Jujuk Nije, Juk Sarem, Juk Jhembut, Juk Dhemang, dan Juk Nudin. Seseorang tersebut merupakan leluhur bagi warga Desa Cermee. Anggapan tersebut muncul atas peranan dari beberapa orang pertama yang menempati Desa tersebut, sehingga dari adanya kedatangan seseorang tersebut, nama desa yang semula tidak memiliki nama, kemudian sekarang dikenal dengan nama Desa Cermee. Selain sebagai pembabat hutan, ia juga diyakini sebagai seseorang yang memberikan nama atas wilayah tersebut.<sup>1</sup>

“Menurut responden yang bernama Mat Saleh, menyatakan bahwa pada awalnya ada pembabat dari Madura yang terkenal sakti diantaranya yaitu Jujuk Nije, Juk Sarem, Juk Jhembut, Juk Dhemang, dan Juk Nudin. Yang terkenal paling sakti diantara kelima orang tersebut adalah Jujuk Nije. Yang memberikan nama Desa Cermee adalah salah satu dari kelima orang sakti tersebut. Pada saat itu dari kelima orang sakti tersebut berkumpul dan sambil beraktivitas, namun di tengah aktivitas tersebut ada yang melihat pohon yang sudah berbuah, kemudian Juk Jhembut bertanya kepada keempat temannya tersebut bahwa siapa yang bisa menebak atau tahu nama dari buah pohon yang dilihatnya maka itu yang akan menjadi nama desa tersebut. Jujuk Nije yang terkenal paling sakti menjawab pertanyaan dari Juk Jhembut, bahwa nama buah dari pohon tersebut adalah buah Cermee, sehingga dari jawaban yang diucapkan oleh Juk Nije tersebut menjadi nama Desa Cermee.”

Dari adanya seseorang yang memiliki peran penting terhadap Desa Cermee, masyarakat sampai saat ini masih meyakini adanya kedatangan seseorang yang sudah terkenal bisa memberikan nama terhadap desanya tersebut. Setiap tahunnya sering diadakan selamatan dan mengaji bersama di setiap makam orang yang menjadi pembabat hutan Desa Cermee. Setiap acara selamatan warga mengadakan kerapan sapi. Kerapan sapi tersebut dimainkan dari kantor desa

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Mat Saleh, di Desa Cermee, Pada 20 November 2018

sampai di makam Jujuk Dhemang. Kerapan sapi merupakan perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Pulau Madura. Pada awalnya adanya kerapan sapi guna untuk membajak tanah pertanian. Tanah Madura yang kurang subur sebagai lahan pertanian, sebagai gantinya orang-orang Madura menggantikan mata pencahariannya sebagai nelayan untuk daerah pesisir dan beternak sapi yang sekaligus digunakan untuk bertani khususnya dalam membajak sawah atau ladang.

Pada awalnya seorang ulama yang bernama Syeh Ahmad Badawi memperkenalkan cara bercocok tanam dengan menggunakan sepasang bambu atau nangala kemudian ditarik dengan dua ekor sapi. Selain sebagai tradisi, kerapan sapi juga sebagai pesta rakyat yang dilaksanakan setelah sukses menuai hasil panen padi atau tembakau.<sup>2</sup> Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa kebudayaan kerapan sapi tersebut dibawa oleh lima orang yang datang dari Madura untuk menetap di Desa Cermee. Kerapan sapi tersebut dahulu sering dimainkan oleh ke lima pembabat hutan tersebut untuk menjadi sebuah hiburan di Desa Cermee. Dari kelima orang itu yang paling menyukai kerapan sapi, adalah Jujuk Dhemang, sehingga sampai saat ini masyarakat Desa Cermee masih peduli dengan adanya kebudayaan tersebut. Setiap acara selamatan desa, masyarakat berinisiatif untuk memainkan kerapan sapi di makam Jujuk Dhemang, selain mengingat kebudayaan yang ada, hal tersebut juga menjadi hiburan bagi masyarakat. Tidak hanya menjadi suatu hiburan, pertunjukan tersebut juga menjadi bentuk tanda terima kasih dari masyarakat Desa Cermee, terhadap jasa yang pernah dilakukan oleh kelima pembabat hutan pada saat itu, karena berkat mereka desa yang semula tidak memiliki nama, kemudian memiliki nama.

Dinamakan Desa Cermee, karena pada waktu kedatangan seseorang yang menjadi pembabat di desa tersebut, banyak pohon Cermee yang memiliki buah seperti duku. Dari adanya pohon itu, salah satu dari kelima pembabat hutan tersebut memberikan nama desa yang sebelumnya tidak memiliki nama yaitu Desa Cermee. Dari tahun ketahun pohon Cermee tersebut semakin punah, namun

---

<sup>2</sup> Nurul Azhar, *et all*, *Antologi Cerita Rakyat Madura*, (Yogyakarta: LKIS, 2017), hlm.85

tradisi masih tetap diperhatikan oleh masyarakat Desa Cermee. Seperti yang diungkapkan Nini:

“Dulu ada yang datang ke desa ini, dia itu orang pertama yang menjadi pembabat hutan di Desa Cermee. Ada lima orang yang menjadi pembabat hutan, orang sini bilang kalau kelima orang itu sakti. Soalnya ada salah satu dari mereka yang suka tidur, tapi dia bisa mendengarkan apa yang dibicarakan oleh keempat temannya. Pada saat itu, mereka berlima sedang beraktivitas dan satunya itu ada yang duduk dan tertidur. Saat mereka beraktivitas, Juk Nije melihat ada pohon yang pohonnya tidak begitubesar, dan sudah berbuah, Juk Nije mengambil satu dari buah itu, kemudian ia berkata kepada keempat temannya “siapa yang tau sama nama buah ini, nama buah ini akan menjadi nama desa ini” sebelumnya Juk Nije meminta ke empat temannya itu mecicipi buah tersebut, namun tidak ada yang bisa menjawab hanya merasakan buah itu kecut, yang bisa menjawab adalah Ju Sarem yang suka tidur, sambil tidur ia menjawab “itu namanya buah cermee’ tanpa ia merasakan dan melihat buahnya terlebih dahulu, ia sudah bisa memberikan jawaban. Dari itulah, desa ini dinamakan Desa Cermee. Pohonnya sekarang sudah jarang, tidak banyak seperti yang dulu.”<sup>3</sup>

Luas wilayah Desa Cermee 838,88 ha, yang terdiri dari sembilan dusun, 16 rukun warga dan 37 rukun tetangga. Desa Cermee ini berbatasan dengan Bondowoso Situbondo. Batas-batas wilayahnya yaitu utara Kabupaten Situbondo, selatan Kecamatan Sempol, barat Kecamatan Botolinggo dan Prajekan, timur Kabupaten Situbondo. Aktivitas masyarakat Desa Cermee yaitu bercocok tanam. Sebagian dari masyarakat Desa Cermee pekerjaannya adalah sebagai petani. Tanah di desa tersebut cocok sebagai tanah pertanian, banyak persawahan yang dapat dijadikan lahan pertanian oleh masyarakat. Persawahan tersebut sesuai dengan kondisi tanah yang ada di Desa Cermee. Lahan persawahan tersebut banyak ditanami padi dan jagung, sehingga hasil panen yang diperoleh dari pertanian masyarakat lebih melimpah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Nini, di Desa Cermee, Pada 1 Februari 2019

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. Kabupaten Bondowoso *Dalam Angka Tahun 2015*

**Tabel 2.1**  
**Luas Tanam, Panen dan Produksi Tanaman Padi & Jagung Kecamatan Cermee Menurut Desa Tahun 2014**

No	Desa	Luas Tanam (Ha)		Luas Panen (Ha)		Produksi (Ton)	
		Padi	Jagung	Padi	Jagung	Padi	Jagung
1.	Suling Kulon	196	184	220	184	1.413	1.373
2.	Solor	0	1.021	0	1.021	0	6.523
3.	Kladi	0	1.044	0	1.044	0	6.821
4.	Bercak	454	317	500	317	2.998	2.300
5.	Cermee	623	101	663	101	4.136	736
6.	Suling Wetan	358	164	358	164	2.300	1.224
7.	Ramban	489	182	559	182	3.490	1.345
8.	Ramban Wetan Kulon	424	67	424	67	2.725	488
9.	Grujugan	314	86	314	86	1.922	591
10.	Bajuran	0	354	0	354	0	2.468
11.	Jirekmas	0	876	0	876	0	5.770
12.	Batu Salang	0	433	0	433	0	2.766
13.	Batu Ampar	99	339	99	339	597	2.278
14.	Pelalangan	97	273	97	273	604	1.922
15.	Bercak Asri	219	262	262	262	1.562	1.900
<b>Jumlah</b>		<b>3.496</b>	<b>5.703</b>	<b>3.496</b>	<b>5.703</b>	<b>21.747</b>	<b>38.507</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka Tahun 2014*<sup>5</sup>

Data tabel 2.1, dapat dikatakan Desa Cermee memiliki potensi tanah yang cukup bagus untuk lahan persawahan. Hasil pertanian yang bagus, membuat masyarakat banyak yang kehidupan ekonominya berkecukupan, sehingga banyak masyarakat yang memiliki lahan yang luas. Dari kepemilikan tanah yang banyak dimiliki oleh masyarakat, bisa dijadikan modal untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya seperti Kepala Desa Cermee yaitu Sutrisno, yang terkenal kaya raya dengan banyak memiliki tanah atau lahan yang luas. Dari kekayaan itu ia dapat menjadi kepala desa, sehingga masyarakat banyak yang mendukung menjadi pemimpin di desa tersebut. Selain pengalaman dan kemampuan, kekayaan juga menjadi modal untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka Tahun 2014*

Dalam pemilihan kepala desa di pedesaan, kekayaan dan keturunan menjadi faktor pendukung seseorang yang ingin menjadi pemimpin di desa. Modal kemampuan dan pengalaman tidaklah cukup untuk menjadi kepala desa, karena masyarakat di pedesaan mempercayai seseorang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa memiliki kedekatan atau hubungan darah dengan mantan kepala desa yang sebelumnya. Keturunan juga sangat penting bagi masyarakat, karena jika seseorang tersebut memiliki hubungan darah dengan pemimpin yang sebelumnya, ia dipercaya untuk dapat menjadi pemimpin dengan baik di desanya. Anggapan masyarakat terhadap seseorang yang memiliki kekayaan dan menjadi kepala desa itu, karena menjadi kepala desa membutuhkan modal yang cukup besar untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Faktor keturunan sangat penting bagi masyarakat untuk menentukan siapa yang layak untuk menjadi pemimpin. Keturunan bagi masyarakat desa merupakan hal yang perlu diperhatikan jika hendak melaksanakan perannya sebagai seorang kepala desa, karena di dalamnya masyarakat desa masih terdapat sekelompok masyarakat yang senantiasa mempertahankan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang masih sangat kental.

Keturunan yang dimaksud adalah nenek moyangnya, orang tuanya, bahkan keluarganya pada zaman dahulu memiliki posisi dan fungsi tertentu dalam masyarakat, sehingga ia memperoleh pengakuan masyarakat akan keberadaannya secara turun temurun. Meskipun hal itu telah terjadi pergeseran nilai-nilai, namun dikalangan masyarakat masih diakui sebagai tokoh panutan yang memiliki pengaruh secara kharismatik. Masyarakat di Desa Cermee masih menjunjung tinggi nilai dan norma-norma yang sifatnya turun-temurun yang berada dalam masyarakat. Apabila seseorang yang menjadi pemimpin di desanya memiliki hubungan keturunan dari mantan kepala desa yang sebelumnya, tingkat keamanan di masyarakat akan lebih baik, karena menurut masyarakat jika yang menjadi pemimpin merupakan keturunan dari kepala desa yang sebelumnya, masyarakat akan menyegani pemimpin tersebut.

### 2.1.1. Geografi Dan Demografi

Bondowoso secara geografis berada di wilayah bagian timur Propinsi Jawa Timur dengan jarak sekitar 200 km dari ibukota Propinsi Jawa Timur, Surabaya. Luas wilayah Kabupaten Bondowoso mencapai 1.560,10  $km^2$ . Kabupaten Bondowoso terletak pada posisi  $7^{\circ}50'10''$  sampai  $7^{\circ}56'41''$  Lintang Selatan dan  $113^{\circ}48'10''$  sampai  $113^{\circ}48'26''$  Bujur Timur. Kondisi dataran di Kabupaten Bondowoso dan perbukitan seluas 44,4% dataran tinggi 24,9% dan dataran rendah 30,7% dari luas wilayah secara keseluruhan. Kabupaten Bondowoso sebelah barat dan utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi sedang sebelah selatan berbatasan dengan Jember. Ketinggian dari laut rata-rata mencapai  $\pm 253$  m di atas permukaan laut. Wilayah tertinggi  $\pm 3.287$  meter dan terendah  $\pm 73$  meter.



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Bondowoso

Sumber: *Profil Kabupaten Bondowoso Tahun 2013*<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Peta Kabupaten Bondowoso Tahun 2013

Pegunungan yang ada di Kabupaten Bondowoso adalah pegunungan Ijen yang terletak di bagian timur dan Pegunungan Argopuro di sebelah barat. Bondowoso juga dapat menghasilkan kopi dari hasil tanah perkebunan yang ada di Bondowoso. Perkebunan kopi tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki kota Bondowoso, karena dari hasil perkebunan, sudah dapat terekspor ke berbagai negara. Perkebunan kopi yang ada di Bondowoso dikelola oleh PTPN Nusantara XII<sup>7</sup>

**Tabel 2.2**  
**Ketinggian, Luas Wilayah dan Jarak**  
**Kantor Desa Kecamatan Cermee Ke Kantor Kecamatan**

No	Desa	Tinggi (m)	Luas (km <sup>2</sup> )	Jarak Kantor Desa ke Kantor Kecamatan
1	Suling Kulon	117	4,04	2
2	Solor	250	62,05	8
3	Kladi	200	21,78	8
4	Bercak	117	5,61	2
5	Cermee	116	8,37	1
6	Suling Wetan	117	9,47	1
7	Ramban Wetan	119	10,55	3
8	Ramban Kulon	119	11,21	4
9	Grujugan	200	3,03	6
10	Bajuran	119	7,04	8
11	Jirekmas	350	18,14	15
12	Batu Salang	200	5,69	6
13	Pelalangan	119	1,07	6
14	Batu Ampar	119	4,24	5
15	Bercak Asri	117	3,07	5
<b>Jumlah</b>		2.379	17.536	78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka Tahun 2014*<sup>8</sup>

Dari tabel di atas dapat dikatakan wilayah Desa Cermee tidak begitu luas jika dilihat dari luas wilayah lain yang memiliki luas wilayah lebih luas. Luas wilayah Desa Cermee yaitu seluas 8,37 Km<sup>2</sup>. Secara keseluruhan Kecamatan

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka Tahun 2013*

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka Tahun 2014*

Cermee memiliki luas 12,920,40  $Km^2$  yang terbagi menjadi 15 desa. Luas wilayah yang hanya memiliki luas 8,37  $Km^2$  juga bisa menjadi salah satu alasan bagi warga Desa Cermee atas pemilihan kepala desa yang mereka jadikan konflik. Masyarakat dapat memanfaatkan keadaan untuk membuat ulah di desanya, karena pada saat pemilihan kepala desa, tidak semua masyarakat akan berpihak kepada salah satu calon kepala desa yang memilih, justru dalam jumlah penduduk yang ada di desa, akan memiliki hak suara kepada kedua calon kepala desa tersebut. maka dari itu, dalam proses pemilihan kepala desa, akan ada yang menang dan ada yang kalah. Terkadang permasalahan itu muncul dari ketidakpuasan masyarakat yang menjadi pendukung pihak yang kalah.

**Tabel 2.3**  
**Data Jumlah Penduduk Kecamatan Cermee**  
**Menurut Desa Tahun 2015-2016**

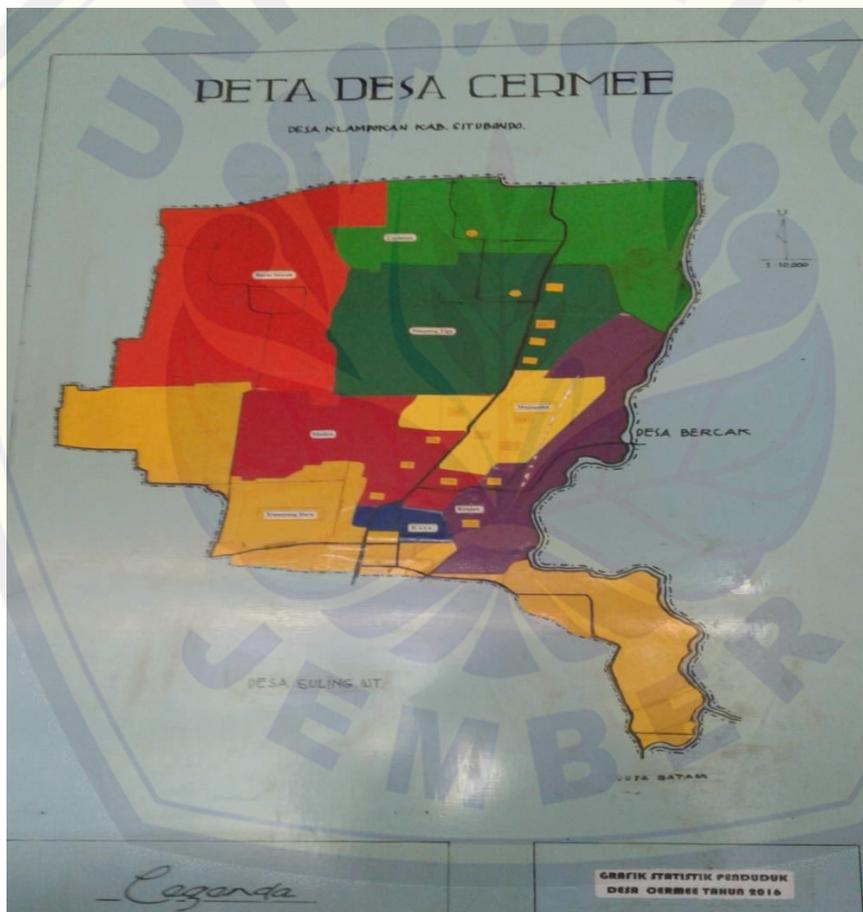
No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	
		2015	2016
1.	Suling Kulon	2.894	2.920
2.	Solor	2.487	2.508
3.	Kladi	2.265	2.284
4.	Bercak	3.076	3.102
5.	Cermee	6.585	6.641
6.	Suling Wetan	3.420	3.449
7.	Ramban Wetan	4.416	4.454
8.	Ramban Kulon	4.526	4.565
9.	Grujugan	2.056	2.073
10.	Bajuran	3.210	3.283
11.	Jirekmas	1.719	1.733
12.	Batu Salang	1.724	1.739
13.	Pelalangan	2.036	2.053
14.	Batu Ampar	1.877	1.892
15.	Bercak Asri	2.608	2.631
<b>Jumlah</b>		<b>44.900</b>	<b>45.282</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka Tahun 2015-2016*<sup>9</sup>

Dari tabel di atas dapat dilihat pertumbuhan penduduk di wilayah Kecamatan Cermee lebih banyak dibandingkan dengan desa yang lainnya, dari tahun 2015-2016 jumlah penduduk Desa Cermee terus meningkat. Melihat luas

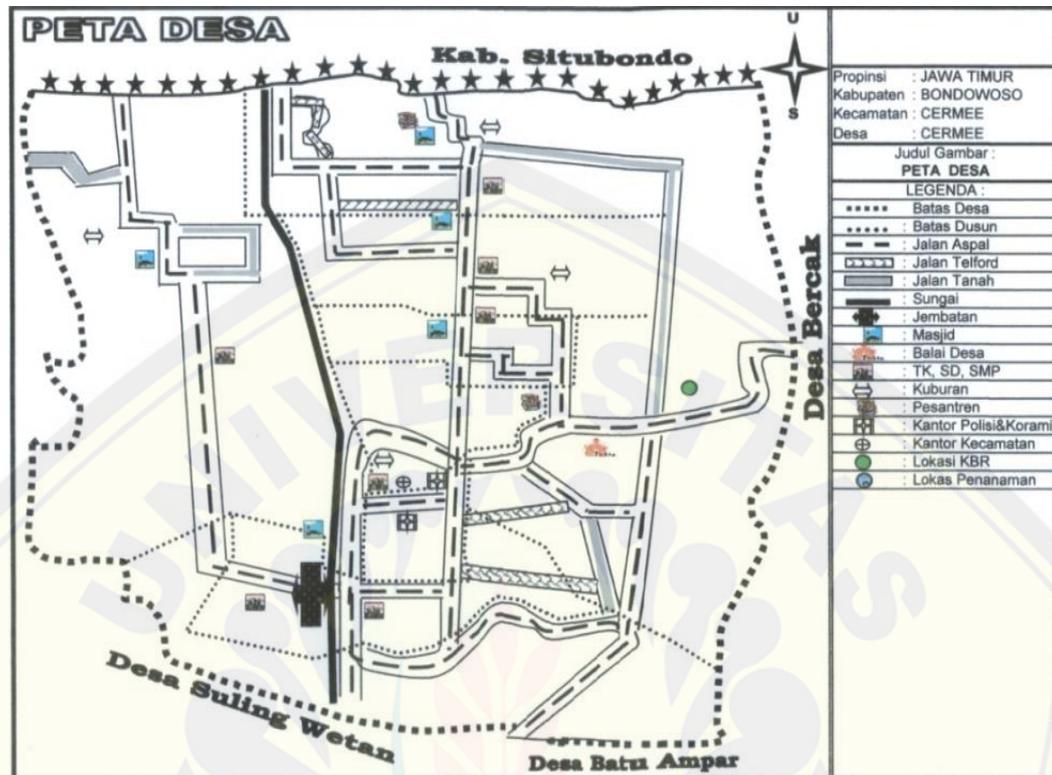
<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka Tahun 2015-2016*

desa yang dimiliki seluas 8,37, maka hal tersebut berdampak pada jumlah penduduk yang berkuasa. Sehingga dalam pemilihan kepala desa tersebut, dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan pendapat yang dimiliki oleh setiap individunya. Sebagian dari masyarakat Desa Cermee berasal dari Madura, yang cenderung memiliki sifat koloni, sehingga keberanian untuk menyampaikan pendapatnya itu dengan cara emosional. Dalam konflik pemilihan kepala desa masyarakat berani untuk melakukan demo tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi. Di bawah ini merupakan peta Desa Cermee yang didapat oleh penulis dari kantor Desa Cermee.



Gambar 2.2 Peta Desa Cermee Tahun 2007  
Sumber: *Arsip Desa Cermee Tahun 2007*<sup>10</sup>

<sup>10</sup>Arsip Kantor Desa Cermee, Peta Desa Cermee Tahun 2007



Gambar 2.3 Peta Desa Cermeo Tahun 2014

Sumber: Arsip kantor Desa Cermeo tahun 2014<sup>11</sup>

Gambar 2.3 merupakan peta Desa Cermeo tahun 2014, jika diamati akan terlihat beberapa dusun yang berada di dalamnya. Dusun-dusun tersebut memiliki keunikan tersendiri, sehingga dari masing-masing dusun akan memiliki cerita yang berbeda pula. Dusun tersebut adalah Dusun Gebang, Cermean, Simpang Tiga, Mojopahit, Madya, Krajan, Kota, Kampung Baru, dan Barat Sawah. Kantor Desa Cermeo lokasinya strategis, hal ini terjadi karena posisi letak wilayah Desa Cermeo berdekatan dengan Kecamatan Cermeo sehingga membuat wilayah tersebut lebih padat penduduk dibandingkan wilayah desa yang lainnya.

<sup>11</sup>Arsip Kantor Desa Cermeo, Peta Desa Cermeo Tahun 2014

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Profesi Masyarakat Desa Cermee**  
**2014**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase dari Total Jumlah Penduduk
1	Petani	459	7.7
2	Buruh Tani	904	15.2
3	PNS/TNI/Polri	112	1.9
4	Karyawan Swasta	-	-
5	Pedagang	314	5.3
6	Wirausaha	672	11.3
7	Pensiunan	46	0.8
8	Tukang Bangunan	49	0.8
9	Peternak	4	0.1
10	Lain-Lain/Tidak Tetap	1.068	17.9
<b>Jumlah</b>		<b>3.628</b>	<b>61%</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka Tahun 2014*<sup>12</sup>

Dari tabel 2.4 dapat bahwasanya masyarakat Desa Cermee pada umumnya bekerja sebagai petani, selain sebagai petani selebihnya terbagi sebagai profesi yang lainnya yaitu seperti buruh tani, pedagang, TNI atau POLRI, dan lain sebagainya. Namun yang menjadi TNI atau POLRI bukanlah penduduk asli Desa Cermee akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah pendatang dari luar kota yang dipindah tugaskan dan menetap menjadi warga Desa Cermee. Dapat dilihat dari hal tersebut minat kerja penduduk adalah bermacam-macam, sehingga hal ini berpengaruh terhadap dunia pendidikan di desa tersebut. Di Desa Cermee terdapat 4 sekolah TK, 6 sekolah SD, 1 sekolah SMP, untuk sekolah menengah atas belum memiliki.

### 2.2.2. Ekonomi dan Sosial Budaya

Jika dilihat dari letak geografis, maka dapat dikatakan sebagian besar masyarakat Desa Cermee berprofesi sebagai petani. Alam yang luas dan tingkat curah hujan yang cukup baik maka masyarakat tidak akan menyalakan kesempatan yang sedemikian rupa. Tingkat kesejahteraan para petani yang lebih menghasilkan di

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka Tahun 2014*

Desa Cermee adalah mereka yang berprofesi sebagai petani padi dan jagung. Awal para petani menanam padi dan jagung, karena di Desa Cermee tanahnya lebih cocok untuk tanah persawahan, hal itu sudah dirasakan sangat cocok dengan kondisi tanah yang ada. Jika ditinjau dari data Badan Pusat Statistik terhadap hasil produksi tanaman yang ada di Desa Cermee, hasil produksi yang besar adalah padi dan jagung.

Penanaman padi dan jagung ini telah dimulai pada saat adanya kedatangan kelima pembabat Desa yang merupakan orang pertama menjadi pembabat Desa Cermee. Kelima orang tersebut berasal dari Pulau Madura. Tidak hanya di Desa Cermee, di desa yang lain di Bondowoso, rata-rata daerahnya cocok untuk tanah persawahan. Melihat letak geografis Kecamatan Cermee yang berada di sebelah timur Kabupaten Bondowoso, maka tidak heran jika di daerah tersebut sebagian dihuni oleh Suku Madura.

Desa Cermee juga berbatasan dengan Kabupaten Situbondo. Perbatasan Kabupaten Bondowoso dengan Kabupaten Situbondo juga membuat migrasi antar wilayah menjadi lebih mudah sehingga terdapat banyak pilihan mengenai perpindahan antar daerah tersebut, warga Bondowoso berpindah ke Kabupaten Situbondo atau sebaliknya. Mayoritas masyarakat Cermee hampir 90% didominasi oleh orang-orang Madura, maka dapat dilihat bagaimana sikap orang-orang Madura dalam hal hubungan sosial maupun budaya.<sup>13</sup> Orang-orang Madura ulet dalam mencari nafkah dan orang-orang yang fanatik dalam beribadah, sehingga dalam kehidupan sehari-hari orang-orang Madura sangatlah menghargai pentingnya mencari nafkah di dunia dan mempersiapkan diri untuk kepentingan kehidupan setelahnya.

Masyarakat Madura sangat patuh terhadap pemimpin non formal mereka yaitu kyai dan ulama. Kyai adalah panutan bagi orang-orang Madura, segala yang menjadi perintah dari kyai merupakan hal mutlak yang harus benar-benar dijalankan. Sebuah karakter yang telah dipelihara secara turun temurun, sehingga terdapat sisi unik tersendiri antara Suku Madura dengan suku yang lain. Dalam

---

<sup>13</sup> Bambang Samsu Badriyanto, *Antropologi Budaya*, (Yogyakarta: Cipta Media, 2013), hlm.80

pemerintahan yang formal, masyarakat Madura merupakan golongan yang patuh terhadap aturan. Ketika mereka mentaati peraturan yang sebenarnya bukan peraturan pemerintah akan tetapi mereka sangat antusias dalam melaksanakannya. Peraturan tersebut merupakan aturan yang diperintahkan oleh kyai. Kyai merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada seorang yang berpengetahuan tinggi dalam bidang agama dan berjasa kepada masyarakat, dan bukan merupakan jenis pekerjaan.<sup>14</sup>



Gambar 2.4 Pengajian Rutin Sholawat Nariyah Di Kantor Desa Cermee<sup>15</sup>  
Sumber: Koleksi kantor Desa Cermee dalam melaksanakan pengajian rutin

Dalam melaksanakan pengajian rutin, semua warga Desa Cermee ikut hadir dalam acara pengajian tersebut. Hal ini sudah dilaksanakan dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kepala Desa Cermee setiap melakukan pengajian, ia mengundang seorang kyai yang bisa menjadi penceramah dalam pengajian tersebut. Hal itu bertujuan untuk memberikan pencerahan terhadap warga Desa Cermee. Peranan seorang kyai dalam kehidupan masyarakat dianggap penting, sehingga adanya seorang kyai dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai hal yang lebih utama dibandingkan adanya pemerintahan formal, karena peranannya

---

<sup>14</sup> Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), hlm.328

<sup>15</sup> Koleksi Kantor Desa Cermee dalam melaksanakan pengajian rutin

sebagai seorang pemuka agama atau orang yang lebih mengerti mengenai agama. Seperti istilah orang Madura yang selalu mengatakan “orang Madura pasti beragama Islam”. adanya gagasan yang sedemikian, maka dapat kita lihat seberapa besar fanatik masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Orang Madura meskipun sifat yang religiusnya tinggi, namun tetap saja mereka masih memiliki karakter yang kurang baik, yaitu adanya budaya *carok*. *Carok* merupakan sikap kasar orang Madura kala harga diri dijatuhkan oleh lawannya. Karakter suku Madura yang khas memiliki ciri tersendiri, orang-orang Madura lebih dikenal sebagai orang yang ulet dalam bekerja, sifatnya yang mobilitas, religius, ambisius, dan mudah tersinggung sehingga orang Madura lebih suka menyelesaikan permasalahannya dengan *carok*. *Carok* adalah adu fisik antara dua orang dengan menggunakan senjata khas orang Madura yaitu celurit. Hal ini juga terjadi pada warga Desa Cermee, pada saat pemilihan kepala desa tahun 2015, adanya kesalahpahaman di antara pendukung lawan yang kalah, sehingga dapat menimbulkan aksi demo. Kesalahpahaman tersebut terjadi karena adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh panitia dalam proses pemilihan kepala desa, sehingga pihak lawan tidak menerima atas kecurangan tersebut. Mereka membuat kekacauan dengan melakukan demo, meskipun tidak sampai terjadi *carok*, namun tindakan tersebut telah membuat masyarakat resah. Keberanian dalam hal tersebut juga menjadi ciri khas orang Madura.

Karakter yang dimiliki suku Madura sedemikian rupa, maka dalam persoalan pemilihan kepala desa memiliki perbedaan pula dengan pemilihan kepala desa yang lain. Sikap orang Madura yang ulet dalam menghadapi permasalahan akan memberikan warna perjuangan yang berbeda. Sikap mereka yang cenderung keras juga akan berpengaruh dalam perjuangan pemilihan kepala desa tersebut.

Budaya Madura juga masih dilakukan oleh masyarakat Cermee, yaitu kerapan sapi. Kerapan sapi ini merupakan kebudayaan asli dari Madura, Kerapan sapi tersebut dibawakan oleh kelima sakti mandra guna yang telah memberikan nama Desa Cermee. Kerapan sapi juga digunakan untuk bercocok tanam, dan untuk membajak sawah. Setiap melakukan acara selamatan desa yang diadakan

setiap tahunnya, kerapan sapi juga menjadi tradisi dalam acara selamatan desa. Kerapan sapi ini dimainkan berkeliling di Pasar Cermeo dan lingkungan desa, serta dimainkan dari kantor desa dan berhenti di makam Juk Dhemang. Masyarakat mengatakan, bahwa Juk Dhemang dahulu sering memainkan kerapan sapi, maka dari itu sampai sekarang tradisi tersebut masih tetap dilaksanakan setiap tahunnya. Dari kedatangan kelima orang tersebut, telah membawa pengaruh kebudayaan dari Madura yang sampai saat ini telah menjadi kebudayaan masyarakat Desa Cermeo. Dari kesadaran dan perhatian masyarakat, kebudayaan tersebut masih dapat dilaksanakan dan diperhatikan. Masyarakat juga peduli terhadap jasa para leluhur yang telah menjadikan Desa Cermeo seperti saat ini.

## 2.2 Sejarah Kepemimpinan Desa Cermeo

Kepemimpinan sebagai proses memimpin suatu pemerintahan untuk menciptakan visi dan misi, dengan melakukan interaksi yang saling mempengaruhi dengan para pengikutnya untuk dapat merealisasikan visi dan misi. Pemimpin adalah inti dari kepemimpinan, pemimpin yang setiap organisasinya atau sistem sosial mempunyai sebutan predikat yang berbeda.

Menurut Wirawan pemimpin merupakan tokoh atau elit anggota sistem sosial yang dikenal berupaya untuk mempengaruhi para pengikutnya secara langsung atau tidak langsung. Pemimpin adalah tokoh anggota masyarakat yang dikenal secara langsung atau tidak langsung oleh pengikutnya. Pemimpin dapat dikelompokkan menjadi pemimpin formal dan informal. Pemimpin formal adalah pemimpin yang menduduki posisi atau jabatan yang formal dalam suatu organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang atau peraturan negara. Mereka diangkat atau dipilih oleh orang yang berhak untuk dapat mengangkatnya dan memilihnya. Pemimpin informal adalah pemimpin yang tidak menduduki jabatan organisasi formal dalam sistem sosial, akan tetapi mempunyai pengaruh terhadap para anggota sistem sosial.<sup>16</sup> Jika dikaitkan dengan kepemimpinan di desa, yaitu berkaitan dengan pemerintahan kepala desa. Desa Cermeo pada tahun 2015 mengadakan pelaksanaan pemilihan pemimpin yaitu kepala desa. Pada saat

---

<sup>16</sup> Wirawan, *Kepemimpinan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.9

itu masing-masing calon untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat ia menyampaikan visi dan misi yang telah dibuat untuk membangun desanya agar dapat menjadi lebih baik. Dari visi dan misi yang disampaikan masyarakat dapat memilih calon kepala desa sesuai dengan tujuan yang disampaikan oleh kedua calon. Kepala desa memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat, karena kepala desa merupakan pemimpin yang mempunyai kualitas pendidikan, ekonomi atau status sosial yang relatif lebih tinggi daripada masyarakatnya. Ia menjadi pemimpin di desa tersebut karena dipilih, diangkat, keturunan atau dituakan oleh masyarakatnya. Berikut daftar kepala Desa Cermee:

**Tabel 2.5**  
**Daftar Pemerintahan Desa Cermee**

No	Periode	Nama Kepala Desa	Ket
1	1942 – 1948	Suhamina	
2	1945 – 1949	Socco	
3	1956 – 1961	Sanahwan	
4	1962 – 1963	Suma'ida	PLT
5	1964 – 1966	Suwakut	
6	1967 – 1968	Suma'ida	
7	1969 -1973	Rafi'i	
8	1974 – 1979	Hasanudin	
9	1980 – 1984	Manijo	
10	1985 1989	Moemtahir	
11	1989 – 1990	Supiarsih	
12	1991 – 1997	Suto	
13	1997 – 1999	Sukaryono	
14	1999 – 2007	Harli Priyatmoko	
15	2007	Mat Saleh	
16	2007 – 2009	Harli Priyatmoko	
17	2009	Mat Saleh	
18	2009 – 2015	Sutrisno S.H.	

Sumber: *Arsip Profil Desa Cermee, Silsilah Pemerintahan Desa Cermee Tahun 2010*<sup>17</sup>

Suhamina merupakan kepala desa pada periode 1942-1948. Ia menjadi kepala desa karena menurut masyarakat Suhamina berani bertanggung jawab dan tegas. Oleh sebab itu Suhamina diminta oleh masyarakat untuk menjadi kepala desa. Pada saat Suhamina menjadi kepala desa, menurut masyarakat seseorang yang dilihat atau dianggap tegas, ia dipercaya dapat menjadi pemimpin dengan

<sup>17</sup> Arsip Profil Desa Cermee Tahun 2010

baik. Suhamina menjadi pemimpin hanya satu periode, untuk periode yang selanjutnya ia tidak mencalonkan kembali, karena ingin memberikan kesempatan kepada yang lainnya.

Socco kepala desa pada periode tahun 1945-1949. Ia menjadi kepala desa karena diminta atau ditunjuk oleh masyarakat. Masyarakat mempercayai beliau pada saat itu untuk menjadi kepala desa, sehingga tidak ada lawan dalam pemilihan tersebut, maka dari itu ia menjadi kepala desa tanpa melakukan proses pemilihan. Masa jabatan beliau berakhir pada tahun 1949, karena pada saat itu jabatan ia akan digantikan oleh kepala desa yang lainnya.

Sanahwan kepala desa pada periode 1956-1961. Ia menjadi kepala desa karena memiliki dukungan dari masyarakat dan merupakan hasil murni pemilihan kepala desa. Sanahwan juga memiliki hubungan saudara dengan Suhamina, yang merupakan kepala desa pada periode 1942-1948. Adanya hubungan saudara tersebut, Sanahwan dapat terpilih menjadi kepala desa karena masyarakat menganggap ia akan menjadi pemimpin yang baik. Jabatan Sanahwan berakhir pada tahun 1961. Pada periode selanjutnya ia tidak meneruskan mencalonkan diri kembali.

Suma'ida kepala desa pada periode tahun 1962-1963. Ia sebelum menjadi kepala desa memiliki jabatan sebagai kepala dusun, kemudian ia mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Cermee. Hal itu tidak berlangsung lama, ia menjadi kepala desa hanya 3 tahun, karena akan digantikan oleh Suwakut.

Suwakut kepala desa pada tahun 1964-1966. Ia menjadi kepala desa karena memiliki dukungan dari masyarakat, namun ia berhenti menjadi kepala desa sebelum masa jabatannya berakhir, karena masyarakat merasa tidak cocok apabila ia menjadi kepala desa. Oleh karena itu, masa jabatan Suwakut berakhir pada tahun 1966.

Suma'ida mencalon dan menjadi kepala desa kembali pada periode 1967-1968, ia mengganti jabatan Suwakut yang telah berhenti sebelum masa jabatannya berakhir. Suma'ida diminta kembali mencalonkan diri sebagai kepala desa karena dirasa sukses menjadi pemimpin pada periode sebelumnya. Jabatan Suma'ida

berakhir pada 1968, karena pada tahun 1968 akan diadakan pemilihan kepala desa serentak. Pada pemilihan kepala desa selanjutnya, Suma'ida tidak mencalonkan kembali.

Rafi'i kepala desa pada periode 1969-1973. Ia menjadi kepala desa, karena menang dan terpilih dalam proses pemilihan kepala desa. Selain itu, ia juga diminta dan didukung masyarakat untuk menjadi kepala desa, namun ia berhenti sebelum masa jabatannya berakhir. Rifa'i menjadi pemimpin di Desa Cermeé tidak menjalankan tugas sepenuhnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, jabatan Rifa'i berakhir pada tahun 1973, dan telah menerima surat berakhirnya jabatan.

Hasanuddin kepala desa periode 1974-1979. Ia menjadi kepala desa karena ditunjuk dan diminta oleh Bupati untuk menjadi kepala desa di Desa Cermeé, karena pada saat itu tidak ada yang siap untuk menjadi kepala desa, sehingga Hasanuddin ditugaskan menjadi Kepala Desa Cermeé, namun sebelumnya ia memiliki jabatan sebagai tentara. Ia menjalankan tugas sebagai kepala desa selama lima tahun, sesuai dengan peraturan bupati yang terkait dengan masa jabatan kepala desa. Pada tahun 1979, masa jabatan Hasanuddin telah berakhir, dan akan digantikan oleh pemimpin yang lain.

Manijo kepala desa periode 1980-1984. Ia diminta untuk menggantikan jabatan Hasanuddin oleh Bupati dan pada sebelumnya ia pernah menjabat sebagai polisi, namun setelah pensiun dari jabatannya ia diminta mencalonkan diri menjadi kepala desa. Manijo menjadi kepala desa pengganti dari kepala desa sebelumnya yang sudah memenuhi jabatannya. Masa jabatan Manijo berakhir pada tahun 1984.

Moemtahir kepala desa periode 1985-1989. Ia sebelum menjadi kepala desa memiliki jabatan di kecamatan. Sebelum masa jabatannya berakhir di kecamatan, ia sudah dipercaya untuk menjadi kepala desa di Desa Cermeé. Ia menjadi kepala desa karena diminta dan dipercaya oleh banyak masyarakat. Selain itu ia juga mendapat kepercayaan dan dukungan dari Camat Cermeé yang menjabat pada tahun 1985. Masa jabatan Moemtahir berakhir pada tahun 1989.

Supiarsih kepala desa pada periode 1989-1990. Ia menjadi kepala desa karena diminta masyarakat, selain itu ia juga memiliki hubungan saudara dengan Rafi'i yang pernah menjadi kepala desa sebelumnya. Ia menjadi kepala desa karena memiliki faktor keturunan dari mantan kepala desa yang sebelumnya. Supiarsih menjadi kepala desa hanya satu tahun, karena selama ia menjadi pemimpin, tanggung jawab terhadap masyarakat sangat kurang. Oleh karena itu, jabatan Supiarsih berakhir satu tahun setelah diangkat menjadi kepala desa.

Suto menjadi kepala desa pada periode 1991-1997. Ia ditunjuk dan memiliki dukungan dari masyarakat, sehingga ia terpilih menjadi kepala desa. berbekal dari dukungan masyarakat ia dapat menjadi pemimpin di Desa Cerme. Suto menjadi kepala desa hingga masa jabatannya berakhir yaitu pada tahun 1997. Pada periode pilkades yang selanjutnya, ia tidak mencalon kepala desa kembali, karena telah ada seseorang yang akan menggantikan ia menjadi pemimpin.

Sukaryono kepala desa pada periode 1997-1999. Ia adalah menantu Moemtahir yang pernah menjadi kepala desa pada sebelumnya, karena ia menantu Moemtahir ia dapat terpilih menjadi kepala desa. Dalam masyarakat pedesaan faktor keturunan menjadi penting untuk seorang pemimpin. Apabila ada seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa, tetapi ia memiliki hubungan darah dengan mantan kepala desa yang sebelumnya, maka ia akan mendapat dukungan dari masyarakat tanpa mengetahui tentang apa yang akan ia lakukan terhadap desanya. Sukaryono menjadi kepala desa tidak berlangsung lama, pada tahun 1999 ia sudah mengakhiri masa jabatannya.

Harli Priyatmoko kepala desa periode 1999-2007. Menjadi kepala desa karena hasil pemilihan pilkades. Selain dari hasil pemilihan Harli juga memiliki hubungan saudara dengan Socco. Harli menjalankan tugasnya selama 6 tahun, dan pada tahun 2007 jabatannya sudah berakhir. Namun untuk periode yang selanjutnya ia akan mencalonkan diri kembali.

Mat Saleh merupakan kepala desa pengganti dari Harli Priyatmoko pada periode 2007, karena pada saat itu, jabatan Harli sudah berakhir dan selama proses pemilihan kembali, Mat Saleh diminta untuk menjadi kepala desa pengganti. Pada saat itu, Mat Saleh memegang dua jabatan yaitu sebagai Sekretaris Desa dan

kepala desa pengganti.<sup>18</sup> Sebelum diadakan pemilihan pilkadesa kembali, Mat Saleh yang menjadi kepala desa pengganti sementara.

Harli Priyatmoko 2007-2009 ia kembali berhasil menjadi kepala desa dalam pencalonannya kembali. Pada tahun 2009 sebelum masa jabatan Harli berakhir. Ia juga mencalonkan diri kembali sebagai ketua DPRD, sehingga ia meminta Mat Saleh untuk menjadi kepala desa pengganti kembali sebelum ada pemimpin yang baru. Harli Priyatmoko dengan Mat Saleh memiliki hubungan saudara, selain itu Harli juga memiliki hubungan saudara dengan Socco.

Sutrisno kepala desa pada periode 2009-2015 dan juga pada tahun 2015 kembali berhasil menjadi kepala desa. Sutrisno menjadi kepala desa karena dukungan dari masyarakat, juga memiliki hubungan darah dengan Supiarsih, Supiarsih adalah orang tua Sutrisno. Selain itu Sutrisno juga memiliki hubungan saudara dengan Rafi'i dan Harli. Sutrisno menjadi kepala desa selain karena kemampuannya sendiri, juga karena faktor keturunan<sup>19</sup> atau anak dari Supiarsih yaitu mantan kepala desa sebelumnya. Pengalaman Sutrisno sebelum menjadi kepala desa ia juga merupakan ketua dari IKSASS P2S2 Sukorejo (Ikatan Santri & Alumni Salafiyah Syafi'iyah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo) dari daerah Cermee. Dianggap aktif dalam organisasi tersebut, pada tahun 2004 Sutrisno juga dipercaya dan didukung untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD di Kabupaten Bondowoso dari partai pengusung PPP (Partai Persatuan Pembangunan), namun dalam pemilihan tersebut ia tidak berhasil terpilih.

Dari adanya silsilah pemerintahan Desa Cermee ini, dapat diketahui bagaimana sejarah kepemimpinan yang telah dapat memimpin Desa Cermee. Untuk dapat menjadi pemimpin di desanya, seorang pemimpin harus memiliki visi dan misi yang baik agar dapat dipercaya dan diterima oleh masyarakat sebagai pemimpin. Menjadi pemimpin atau kepala desa, ditentukan dan dipilih oleh masyarakat, dalam setiap pencalonan harus ada dua atau lebih pemimpin kepala desa.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Mat Saleh, di Desa Cermee, Pada 27 Desember 2018

<sup>19</sup> Wawancara dengan Sutrisno, di Desa Cermee, Pada 27 Desember 2018

Dari masing-masing kedua calon harus memiliki visi dan misi yang berbeda, namun visi dan misi tersebut bersifat positif bagi perkembangan desa dan masyarakatnya. Visi dan misi yang disampaikan kepada masyarakat oleh Sutrisno sebagai calon kepala desa yaitu:

“Visi misi saya untuk mencalonkan kepala desa yaitu, membangun masyarakat yang beriman, bertakwa, dan berkeadilan. Misinya yaitu menghidupkan kegiatan keagamaan dan memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan oleh tempat belajar keagamaan misalnya seperti musholla, masjid, madrasah, dan pondok pesantren.”<sup>20</sup>

Kepala desa memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mendamaikan perselisihan yang terjadi pada masyarakat desa, dan memelihara ketentraman, ketertiban masyarakat desa, menetapkan peraturan desa, peraturan kepala desa, peraturan bersama kepala desa dan keputusan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, dan mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.<sup>21</sup> Jadi tugas Kepala Desa Cermee sama seperti dengan visi dan misi yang dimiliki oleh Sutrisno, yaitu untuk membangun masyarakat menjadi lebih baik contohnya yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat, membina kehidupan masyarakat desa, serta dapat membina ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Kepemimpinan di Desa Cermee, ditentukan oleh kemampuan seseorang yang menduduki jabatan sebagai kepala desa, untuk dapat mempengaruhi masyarakatnya, terutama bawahannya untuk dapat berpikir dan bertindak sedemikian rupa. Melalui perilaku positif ia dapat memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuannya. Kepala desa memiliki kesadaran mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Kewenangan desa dalam bidang pembangunan desa, meliputi pelayanan dasar desa, sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi desa, pemanfaatan sumber daya alam dan

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Sutrisno, di Desa Cermee, Pada 1 Mei 2018

<sup>21</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso, No.5 Tahun 2014, *Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa*, hlm.69

lingkungan desa. Tujuan dalam pembangunan desa tersebut, untuk dapat mewujudkan masyarakat desa yang beriman dan bertakwa, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kewenangan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dapat berupa pengembangan seni budaya, pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat, fasilitas kelompok-kelompok masyarakat, dan fasilitas terhadap kelompok masyarakat miskin. Sutrisno sebagai Kepala Desa Cermee, ia memberikan bantuan berupa sembako, dan memfasilitasi tempat-tempat pendidikan anak-anak yang mengaji atau sekolah madrasah. Dalam sejarah kepemimpinan, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang penting bagi masyarakat dan desanya maka dari itu, untuk dapat memilih pemimpin dapat dipertimbangkan dan memilih pemimpin yang baik, yang bisa dan dapat memimpin desanya. Hal yang dianggap strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu antara lain, penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMD (Badan Usaha Milik Desa), penambahan dan pelepasan aset desa serta kejadian luar biasa.

Pemilihan kepala desa di Desa Cermee, dari awal memang dalam bentuk pemilihan hak suara, dimana rakyat memberikan hak suaranya kepada salah satu calon yang akan menjadi kepala desa. Pada periode tahun 1974-1979 dan 1980-1984 tidak ada proses pemilihan kepala desa, namun bupati yang menunjuk dan meminta orang yang dipercaya untuk menjadi pemimpin di Desa Cermee. Pada tahun tersebut, yang menjadi kepala desa bukan dari pilihan rakyat, melainkan dari ketentuan bupati. Semua yang pernah menjadi kepala desa di Desa Cermee merupakan orang asli Desa Cermee sendiri, bukan pendatang dan tidak ada yang berasal dari desa luar. Tradisi pemilihan kepala desa di Desa Cermee, jika bukan keturunan yang pernah menjadi kepala desa yang sebelumnya, masyarakat tidak percaya kepada calon tersebut untuk memimpin desanya. Masyarakat mempercayai bahwa orang yang mencalon kepala desa memiliki keluarga atau

saudara yang pernah menjadi kepala desa sebelumnya, itu dapat menjadi pemimpin yang baik, karena sudah memiliki keturunan yang pernah menjadi kepala desa.

Kepala desa juga diberi hak untuk mengelola tanah bengkok yang diberikan oleh pemerintah. Tanah bengkok merupakan tanah garapan milik desa yang berupa tanah tegalan dan sawah. Tanah bengkok ini tidak dapat diperjual belikan tanpa persetujuan dari seluruh warga desa namun dapat disewakan oleh mereka yang telah diberi hak untuk mengelolanya.<sup>22</sup> Tanah bengkok yang dikelola oleh Desa Cermee 2.200 m<sup>2</sup>. Tanah bengkok ini dikelola oleh desa sebagai upah perangkat desa selama masih menjabat. Pengelolaan tanah bengkok di Desa Cermee, dikelola oleh kepala desa, namun setiap anggota perangkat desa juga ikut menikmati hasil dari pengelolaan tanah bengkok tersebut.

Pemerintah daerah memiliki kebijakan masing-masing didalam mengelola tanah bengkok, misalnya sekretaris desa dapat menerima dari setengah hasil pengelolaan tanah bengkok tersebut. Tanah bengkok salah satu tanah desa yang merupakan barang milik desa. Tanah kas desa adalah kekayaan desa dan menjadi milik desa. Hasil dari pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa selain dari penghasilan tetap. Tanah bengkok adalah hak kelola yang melekat pada seorang pejabat desa selama ia menjabat jabatan tersebut, seperti lurah, sekdes, dan kepala kampung. Pada dasarnya tanah bengkok yang diperuntukkan sebagai pengganti gaji kepala desa yang merupakan milik desa tidak boleh dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan umum. Pemerintahan daerah biasanya memiliki kebijakan masing-masing dalam mengelola tanah bengkok, misalnya sekretaris desa boleh menerima separuh hasil dari pengelolaan tanah tersebut.

---

<sup>22</sup> Peraturan Bupati Bondowoso No. 8 Tahun 2014, *Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa*,

### 2.3 Pembentuk Kepribadian Dari Kedua Calon

Setiap individu hidup dan bertindak tidak lepas dari pengaruh yang ada di sekitarnya, baik keluarga, pendidikan atau masyarakat yang secara luas. Hal tersebut sudah menjadi hukum alam dan kenyataan yang harus dihadapi, terutama bagi seorang yang memiliki tingkat kepekaan tinggi atau seorang cendekiawan yang mempunyai kedudukan dan kelas di lingkungannya. Sutrisno menjadi kepala desa karena ia memiliki dukungan dari banyak masyarakat, memiliki harta kekayaan yang dapat dikatakan cukup banyak, selain itu ia juga memiliki pengalaman. Pengalamannya tersebut yaitu pernah menjadi kepala desa pada periode sebelum ia mencalonkan diri menjadi kepala desa kembali, dan ia juga telah menjadi Sarjana dengan ijazah S1 ilmu hukum. Sehingga dari pengalaman yang dimiliki ia juga termotivasi untuk dapat terus mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakatnya serta ingin melanjutkan program kerja yang masih belum terealisasi sebelumnya. Banyaknya dukungan dari masyarakat juga karena faktor keturunan dari Sutrisno. Sutrisno merupakan anak dari mantan kepala desa yaitu Supiarsih, ayah Sutrisno pernah menjadi pemimpin di Desa Cermee, maka dari itu masyarakat memilih Sutrisno karena ia adalah keturunan kepala desa yang sebelumnya. Masyarakat beranggapan bahwa seseorang yang memiliki keturunan menjadi kepala desa, maka ia pantas untuk menjadi kepala desa dan menjadi panutan bagi masyarakat. Orang yang memiliki keturunan akan banyak dihormati oleh masyarakat. Latar belakang kelas dan kedudukan dapat memberikan pengaruh pada seseorang yang menjadi cendekiawan itu sebagai dasar dan apa yang akan ia jelaskan.<sup>23</sup>

Pendidikan Sutrisno dari SD (Sekolah Dasar) sampai SMA (Sekolah Menengah Atas), setelah ia lulus dari SMA, ia melanjutkan S1 Sarjana Hukum. Sutrisno menjabat sebagai kepala desa atas dukungan dan dorongan dari masyarakat dan keluarga, pada sebelumnya Sutrisno tidak memiliki pengalaman apapun dalam dunia politik. Dari dorongan sekaligus pujian yang diberikan oleh

---

<sup>23</sup> Ron Eyerman, *Cendekiawan: Antara Budaya Dan Politik Dalam Masyarakat Modern* (Terj, Matheos Nalle), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), hlm.8

masyarakat dan keluarga, ia anggap sebagai tantangan bagi dirinya untuk dapat bisa menjadi pemimpin.

### 2.3.1 Riwayat Hidup Sutrisno



Gambar 2.5 Foto Sutrisno

Sumber: *Koleksi Pribadi Sutrisno, diambil pada 25 Desember 2018*<sup>24</sup>

Sutrisno merupakan anak dari Supiarsih dan Herlani. Ayah Sutrisno berprofesi sebagai mantan kepala desa di Desa Cermee pada tahun 1989-1990, dan ibu Sutrisno hanya sebagai ibu rumah tangga. Sutrisno lahir pada 2 April 1973. Ia menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Cermee, lulus pada tahun 1985<sup>25</sup>, kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Cermee dan lulus pada tahun 1988<sup>26</sup>.

SMA dia melanjutkan ke SMAN 1 Tapen, lulus pada tahun 1991<sup>27</sup>. Setelah ia selesai belajar di bangku SMA, pada tahun 1991 Sutrisno melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1 Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Jember

---

<sup>24</sup> Koleksi Pribadi Sutrisno, diambil Pada Tanggal 25 Desember 2018

<sup>25</sup> Lihat Lampiran C No.1, Arsip Pribadi Sutrisno Ijazah SD Tahun 1985

<sup>26</sup> Lihat Lampiran C No.2, Arsip Pribadi Sutrisno Ijazah SMP Tahun 1988

<sup>27</sup> Lihat Lampiran C No.3, Arsip Pribadi Sutrisno Ijazah SMA Tahun 1991

dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1996<sup>28</sup>. Sutrisno Sebelum menjadi kepala desa, ia juga pernah aktif dalam Partai Politik PPP, sehingga dia maju untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Bondowoso pada tahun 2004. Dalam pemilihan tersebut, Sutrisno tidak terpilih namun ia tetap semangat untuk terus berusaha agar ia bisa menjadi seorang pemimpin. Sutrisno juga merupakan Ketua IKSASS P2S2 Sukorejo<sup>29</sup>, sehingga ia mendapatkan dukungan dari Partai PPP<sup>30</sup>. Pada tahun 2009, Sutrisno mendapat dukungan dari masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Cermee. Sutrisno juga memiliki dukungan dari teman dan keluarganya, sehingga ia bersedia untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa tersebut Sutrisno terpilih sebagai kepala Desa Cermee.

Sutrisno merupakan pemimpin di Desa Cermee, dan menjadi kepala desa selama dua periode, yaitu antara periode tahun 2009-2015, dan periode kedua yaitu tahun 2015-2020. Pada saat ia mencalonkan diri kembali sebagai kepala desa, Sutrisno harus mengikuti peraturan sesuai yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan tersebut yaitu kepala desa yang akan moncalonkan kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Selama masa masa cuti kepala desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala desa. Pada saat kepala desa cuti, sekretaris desa melaksanakan tugas

---

<sup>28</sup>Lihat Lampiran C No.4, Arsip Pribadi Sutrisno Ijazah Sarjana S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember Tahun 1996

<sup>29</sup> IKSASS P2S2, merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Kepanjangan dari IKSASS P2S2 yaitu Ikatan Santri & Alumni Salafiyah Syafi'iyah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.

<sup>30</sup> PPP (Partai Persatuan Pembangunan) merupakan partai politik yang berada di Indonesia. Partai PPP ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan yaitu NU, PSII, Perti dan Permusi. Penggabungan ke empat partai keagamaan tersebut, bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973. Lihat, Mahrus Irsyam dan Lili Romli, *Menggugat Partai Politik*, (Jakarta: LIP FSIP UI, 2003), hlm.118

dan kewajiban kepala desa.<sup>31</sup> Sutrisno berasal dari keluarga yang terkenal kaya. Jika melihat orang tuanya adalah mantan kepala desa, maka ia sangat didukung oleh masyarakat untuk menjadi kepala desa di desanya sendiri. Selain karena keturunan, Sutrisno juga memiliki kemampuan sendiri yaitu pengalaman sebelum menjadi kepala desa, yaitu aktif di dalam partai PPP dan pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD di Kabupaten Bondowoso, meskipun ia tidak terpilih. Selain itu Sutrisno juga memiliki pendidikan terakhir S1 dengan gelar S.H. (Sarjana Hukum), maka pengetahuan Sutrisno untuk menjadi seorang pemimpin di desanya itu sangat baik.

Sebagai kepala desa, Sutrisno berperan penting dalam pembangunan desa. Menjadi kepala desa, harus mengakar dalam masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tugas kepala desa bukan sekedar menyelenggarakan pemerintahan desa, tetapi ia juga melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Tugas dan wewenang Sutrisno menjadi kepala desa di Desa Cermee, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara keamanan terhadap lingkungan masyarakat, menjalin kerjasama dengan masyarakat dan perangkat desa, memberikan keadilan serta dapat menyelesaikan perselisihan yang ada di desa, membina dan dapat melestarikan budaya desa.

Menjadi kepala desa bagi Sutrisno tidak mudah, karena banyak mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin terhadap desanya. Sebagai kepala desa juga dapat melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Kepala desa juga berfungsi secara sosial ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, dan pemuda. Kepala desa memang memiliki tugas dan fungsi yang luas dan menyeluruh pada berbagai aspek kehidupan pemerintahan desa.<sup>32</sup> Disuatusisi hal itu juga menempatkan kepala desa sebagai orang yang memiliki kekuasaan yang luas baik di luar ataupun di dalam. Kemampuan untuk dapat melakukan sesuatu sesuai dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimilikinya pada

---

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, hlm.14

<sup>32</sup> Wawancara Dengan Sutrisno, di Desa Cermee, Pada 21 November 2018

bidang tertentu. Kepala desa bertugas untuk melakukan dan meningkatkan pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan upaya terencana dan berkesinambungan untuk peningkatan kualitas hidup kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Sutrisno menjadi kepala desa, mendapatkan dukungan dari istrinya dan sekaligus menjadi salah satu faktor keberhasilan dari kepemimpinannya di Desa Cermee. Keberhasilan seorang laki-laki sering terjadi karena ada perempuan tangguh di belakangnya. Dari dukungan itulah Sutrisno semangat untuk menjadi pemimpin di Desa Cermee. Dukungan tersebut menjadi kekuatan untuk Sutrisno dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa. Selain mendapat dukungan dari istrinya, ia juga mendapatkan dukungan dari orang tua dan masyarakat. Masyarakat sangat mendukung Sutrisno untuk menjadi calon kepala desa kembali, karena Sutrisno selama masa kepemimpinan di periode pertama, telah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam periode yang kedua ini, Sutrisno berharap dapat melanjutkan program kerjanya yang belum terealisasi.

Dalam kesehariannya selain ia bekerja menjadi kepala desa, Sutrisno juga memiliki hobi mengkoleksi tumbuhan bonsai. Sutrisno sudah beberapa kali mengikuti kontes bonsai adenium di Bondowoso dan daerah kabupaten lainnya. Untuk dapat meraih juara, Sutrisno harus bersaing dengan penggila bonsai dari Semarang, Madura, Jakarta dan Bali. Menurut Sutrisno ikut kontes bonsai adenium ini sangat menarik karena mampu memberikan hiburan bagi keluarga dan masyarakat, terutama pecinta bonsai yang berada di kota republik kopi ini. Hobi mengkoleksi bonsai dan mengikuti lomba, sudah menjadi bisnis sampingan bagi Sutrisno selain menjadi kepala desa, ia tidak lupa dengan kedudukannya sebagai kepala desa, dan ia tetap menjadi pemimpin yang baik bagi masyarakat. Hobinya tersebut juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat, supaya untuk peduli terhadap budaya dan lingkungannya.

### 2.3.2 Riwayat Hidup Edy Sukamto



Gambar, 2.6 Foto Edy Sukamto

Sumber: *Koleksi Pribadi Edy Sukamto diambil 8 Agustus 2018*<sup>33</sup>

Edy Sukamto adalah anak dari Mohammad Hatta dan Ammadiyah. Ia lahir di Bondowoso pada 8 Juli 1956. Ayah Edy Sukamto mantan Purnawirawan Polri, sedangkan ibu Edy hanya sebagai ibu rumah tangga. Edy Sukamto memiliki seorang istri yang bernama Enik Nur Hariyati yang profesinya sebagai guru Sekolah Dasar. Ia dikarunia dua anak laki-laki dan perempuan, yaitu Yanis Virgin dan yang kedua Alvin Oskar Viovani. Masa kecilnya ia juga semangat dalam menjalankan pendidikannya. Edy menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Cermee dan lulus pada tahun 1968<sup>34</sup>. Ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP yaitu di SMPN 1 Prajekan dan lulus pada tahun 1972<sup>35</sup>. Ia kemudian melanjutkan pendidikan jenjang SMA di SMAN 1 Situbondo, lulus pada tahun

---

<sup>33</sup> Koleksi Pribadi Edy Sukamto diambil pada 8 Agustus 2018

<sup>34</sup> Lihat Lampiran C No.5 Arsip Pribadi Edy Sukamto Ijazah SD Tahun 1996

<sup>35</sup> Lihat Lampiran C No.6, Arsip Pribadi Edy Sukamto Ijazah SMP Tahun 1972

1975<sup>36</sup>. Edy Sukamto sempat kuliah di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, namun berhenti ketika sudah semester 4. Selama masih kuliah ia sambil bekerja di KUD Sinar Baru Cermee pada tahun 1979. Tahun 1980 bekerja di Kantor Pembantu Bupati Kecamatan Prajekan selama tiga bulan, setelah itu ia berhenti dan bekerja di Kecamatan Cermee tahun 1991 sebagai Kasi PMD (Pembangunan Masyarakat Desa). Pada tahun 2009, ia diangkat menjadi PNS dengan pangkat Penata TK. I III/d, tahun 2011 ia pensiun dan naik pangkat menjadi Pembina golongan IV/a.<sup>37</sup>

Pada tahun 1991-2005 Edy menjadi pegawai Kecamatan Cermee, namun pada saat tahun 2006 ia dipindah tugaskan ke Kecamatan Klabang sebagai Kasi Pembangunan Masyarakat Desa (PMD). Beliau juga pernah ditunjuk oleh Camat Cermee untuk menjadi kepala desa pengganti di Desa Kladi. Sebagai PNS, Edy harus dapat memenuhi syarat untuk bisa mencalonkan diri sebagai kepala desa. Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri sebagai kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal pegawai negeri sipil terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa berhak mendapatkan tunjangan kepala desa dan penghasilan lainnya yang sah. Pada tahun 2015 Edy menjadi calon kepala desa dan bersaing dengan Sutrisno. Dalam pencalonan tersebut Edy tidak berhasil mengalahkan Sutrisno, malah justru sebaliknya, dalam pemilihan kepala desa tersebut Sutrisno yang terpilih menjadi kepala desa. Edy Sukamto mencalonkan kepala desa karena mendapat dukungan dari masyarakat yang sangat menginginkan ia menjadi kepala desa di. Dari adanya dukungan masyarakat, membuat ia bersedia untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa. Menurut Edy Sukamto, sebenarnya ia tidak ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa, karena

---

<sup>36</sup>Lihat Lampiran C No.7, Arsip Pribadi Edy Sukamto Ijazah SMA Tahun 1975

<sup>37</sup>Lihat Lampiran C No.8, Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor :00074/KEP/CV/23511/2011

ia ingin beristirahat dari dunia pekerjaannya, namun banyak masyarakat yang meminta untuk mencalonkan diri sebagai kepala Desa Cermee.

Edy Sukamto sudah siap menerima kekalahan jika pada pemilihan kepala desa tersebut ia dinyatakan kalah, meskipun ia mencalonkan diri sebagai kepala desa karena dukungan dari masyarakat. Edy Sukamto ikhlas dan siap untuk menjadi pemimpin di desanya. Beliau telah mempersiapkan visi dan misi untuk pembangunan dan perkembangan Desa Cermee. Ia juga melakukan kampanye ke masyarakat setempat, dan membuat program kerja terhadap desanya supaya nanti jika Edy Sukamto yang menjadi pemimpin di desa tersebut, dapat berguna bagi masyarakat Desa Cermee. Masyarakat sangat antusias dalam mendukung Edy Sukamto sebagai calon kepala desa. Pendukung Beliau berasal dari tokoh masyarakat, pegawai dan masyarakat biasa. Edy Sukamto tetap berusaha melakukan sesuatu untuk dapat terpilih menjadi kepala desa dan dapat memimpin desanya.

Sebelum ia mencalonkan diri sebagai kepala desa, Edy Sukamto memiliki jabatan sebagai pegawai kecamatan, sampai ia pensiun. Ia juga pernah menjadi kepala desa pengganti di Desa Kladi, pada saat itu ia ditugaskan oleh camat, karena dipercaya bahwa bisa memimpin desa yang telah ditentukannya. Berbagai upaya yang dilakukan Edy Sukamto untuk menjadi kepala desa, yaitu dengan membuat program kerja dan memiliki visi dan misi terhadap perkembangan desanya. Akan tetapi hal itu tidak mudah dilakukan oleh Edy meskipun banyak pendapat yang kurang baik terhadapnya.

Motivasi Edy untuk mencalon sebagai kepala desa ingin mengentas pengangguran bagi kalangan pemuda-pemuda desa dengan cara memberikan lapangan pekerjaan. Beliau juga merupakan keturunan Purnawirawan Polri, jika melihat jabatan yang dimiliki oleh ayahnya maka ia juga pantas untuk dihormati dan memiliki dukungan dari masyarakat. Visi dan misi yang di programakan oleh Edy Sukamto terhadap Desa Cermee yaitu ingin ada perubahan atau peningkatan dalam segala sektor, karena menurut Edy dari yang sebelumnya masih belum tampak ada perubahan. Dia juga ingin memberdayakan generasi muda, yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan juga orang

yang masih belum memiliki pekerjaan. Contohnya seperti mengadakan kursus jahit, keterampilan yang semuanya bisa dapat menghasilkan bagi generasi muda.<sup>38</sup>

Usaha yang dilakukan bagi setiap calon adalah membuat program kerja untuk pembangunan desa yang akan dipimpinnya. Selain itu akhlak dan iman yang dimiliki oleh setiap calon juga penting untuk dapat mengambil hati masyarakat. Serta rasa simpati yang diberikan kepada masyarakat. contoh kecilnya yaitu ketika salah satu dari masyarakat mendapatkan musibah, maka mereka harus bisa membantu dan ikut berempati atas musibah yang terjadi. Cara berkomunikasi dan bersosialisasi dengan masyarakat juga menjadi peran penting untuk usaha agar bisa menang. Orang desa ia akan melihat bagaimana ia bersosialisasi dengan baik sehingga seseorang tersebut dapat dikatakan pantas untuk menjadi kepala desa.

Usaha lain yang dilakukan oleh Edy agar memperoleh kemenangan, calon kepala desa harus pintar mengambil hati masyarakat dengan cara bersosialisasi, ikut bergotong royong, bersikap baik, ikut berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan masyarakat. Masing-masing calon harus bisa membuktikan bahwa program kerjanya tersebut dapat terealisasi dengan baik.

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Edy Sukamto, di Desa Cermee, Pada 19 November 2018

## **BAB 4**

### **KESIMPULAN**

Faktor penyebab terjadinya konflik pilkades, pada saat sebelum pemilihan pilkades, telah ditetapkan siapa yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa, maka dari itu terbentuklah dua kubu. Dari masing-masing kubu sudah memiliki pendapat yang berbeda, perbedaan pendapat ini membuat pihak kedua kubu sama-sama tidak ingin dikalahkan. Faktor yang lain, pada saat ditentukannya siapa yang menang dalam pilkades ini, maka pendukung yang kalah menduga panitia melakukan kecurangan, sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik antar pendukung pihak yang kalah dengan panitia.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa diselenggarakan pada tanggal 1 Juni 2015, di lapangan Kecamatan Cermee. Dalam pemilihan kepala desa terdapat asas yang sama dengan asas pemilu. Dalam peraturan daerah, Asas tersebut yaitu: Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Seluruh warga desa dapat memilih secara langsung para calon kepala desa sesuai dengan keinginannya masing-masing dan tidak boleh diwakilkan. Pelaksanaan pemilihan kepala desa ini dibutuhkan ketua panitia dan anggota panitia untuk mempersiapkan proses pemilihan. Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan kewenangan untuk dapat mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pemilihan kepala desa. Selain itu untuk menyukseskan masing-masing calon kepala desa, dibentuk tim sukses. Tugas tim Sukses membantu panitia untuk melancarkan berjalannya proses pemilihan kepala desa. Pemungutan suara dibuka pada pukul 07:00 WIB oleh Camat Cermee yaitu Suhairi Ali Candra, dengan atas nama

Panitia Desa Cermee. Dari hasil pemilihan, calon kepala desa yang terpilih adalah nomer urut satu, yaitu Sutrisno yang sebelumnya pernah menjadi kepala desa, kemudian mencalonkan diri kembali.

Pada pemilihan tahun 2015, di Desa Cermee sudah mulai terjadi konflik yang diakibatkan karena adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh panitia terhadap proses pemilihan kepala desa. Dugaan kecurang tersebut ditemukan satu hari setelah pemilihan kepala desa dilaksanakan. Pendukung dari calon yang kalah menemukan bukti adanya surat suara yang berada di luar kotak suara, namun seharusnya surat suara tersebut berada di dalam kotak suara. Bukti yang lainnya yaitu ditemukannya bahwa panitia pemilihan menggunakan DPT yang lama, bukan DPT yang baru ditentukan oleh BPD. Selain itu, adanya undangan yang masih belum diedarkan oleh panitia. Pendukung Edy Sukamto mengatakan bahwa panitia benar-benar melakukan kecurangan, sehingga ia tidak menerima atas perbuatan yang telah dilakukan panitia. Pemilihan kepala desa merupakan suatu peristiwa politik lokal sebagai salah satu wujud demokrasi yang berada dalam pemerintahan Indonesia. Dalam perkembangannya pemilihan kepala desa tidak jarang diwarnai oleh konflik dan pertentangan diantara masing-masing pendukung calon.

Setiap permasalahan akan selalu ada jalan keluarnya atau dapat diselesaikan. Dari terjadinya konflik pemilihan kepala desa ini, kasus tersebut diselesaikan melalui jalur hukum, yaitu melakukan perkara ke Pengadilan Negeri Bondowoso. Adanya perkara ini, kasus yang terjadi dapat diketahui secara jelas dan akan mendapatkan solusi yang baik untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut. Dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi, sudah ada yang lebih berhak untuk memutuskan keadilan dalam proses penyelesaian konflik. Hasil penyelesaian konflik ini, pihak pengadilan memberikan putusan dan menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diselidiki, ternyata para tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu point pokok dalam perkara ini haruslah dinyatakan ditolak, karena gugatan penggugat ditolak seluruhnya, maka penggugat berada pada pihak yang dikalahkan. Putusan ini telah diputuskan dan ditandatangani oleh ketua majelis hakim Indah Novi Susanti, S.H.,

M.H sebagai ketua majelis hakim, Ni Kadek Susanti, S.H dan Subronto, S.H., M.H. Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini Rp. 3. 784.000,00.

Konflik yang terjadi memiliki dampak positif dan negatif terhadap perkembangan masyarakat. Dampak positifnya yaitu dapat memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat dan pemimpin yang diinginkan masyarakat. Mengajarkan kepada generasi muda tentang tatacara pemilihan kepala desa, sehingga dari adanya pilkades, dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pilkades. Dampak negatif yang diakibatkan adalah rawan konflik yang terjadi apabila ada pihak yang tidak dapat menerima atas kekalahannya. Dampak negatif lain, adanya kesalahpahaman yang dirasakan oleh pihak pendukung yang kalah, sehingga dapat melakukan perkara ke Pengadilan Negeri Bondowoso. Hal ini juga menimbulkan kerugian karena dalam hasil perkara tersebut, laporan dari pihak penggugat ditolak dan diminta untuk membayar biaya perkara. Dari adanya konflik tersebut, sangat berdampak terhadap kondisi yang terjadi di desa, masyarakat menjadi takut apabila desanya mengalami konflik karena konflik tersebut berpengaruh terhadap keamanan desanya. Meskipun tidak ada kerusakan dan kekerasan yang dilakukan oleh warga Desa Cermee, namun kasus tersebut tetap berdampak bagi aktivitas masyarakat sehingga menjadi terganggu.

## DAFTAR SUMBER

### Buku:

- Abdurahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz media. 2007
- Aminah, Siti. *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta: Kencana, 2014
- Assidiq, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika. 2006
- Azhar, Nurul. *et all. Antologi Cerita Rakyat Madura*. Yogyakarta: LKIS. 2017
- Badriyanto, Bambang Samsu. *Antropologi Budaya*. Yogyakarta: Cipta Media. 2013
- Bottomore, Tom. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1977
- Burke, Peter. *Sejarah dan Teori Sosial terjemahan Yayasan Obor Indonesia*. Jakarta: Adikarya Ikapi Program Pustaka. 2001
- Duverger, Maurice. *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindom Persada. 1996
- Eyerman, Ron. *Cendekiawan: Antara Budaya Dan Politik Dalam Masyarakat Modern (Terj, Matheos Nalle)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1996
- Francis, Diana. *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*. Yogyakarta: Quills. 2006
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyai Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya 1989

- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press. 1975
- H Rudini. *Atas Nama Demokrasi Indonesia*. Bandung: Bina Cipta. 2000
- Hidajat, Imam. *Teori-teori Politik*. Malang: Setara Press. 2009
- Irsyam, Mahrus. *et all. Menggugat Partai Politik*. Jakarta: LIP FISIP UI. 2003
- Ismawan, Indra. *Money Politic (Pengaruh Uang Dalam pemilu)*. Yogyakarta: Media Perssindo. 1999
- Istianto, Bambang. *Demokratisasi Birokrasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2013
- Joeniarto. *Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Negara*. Jakarta: Pt Rineka Cipta. 1990
- Kartodirdjo, Sartono. *Pesta Demokrasi di Pedesaan*. Yogyakarta: Aditya Media. 1992
- Kartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1981
- Kumolo, Tjahjo. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Bandung: PT Mizan Publika. 2015
- Kuntowijoyo. *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*. Jogjakarta: Mata Bangsa. 2002
- \_\_\_\_\_. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT: Tiara Wacana Yogya. 2003
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng. 2015
- Maliki, Zainuddin. *Sosiologi Politik: Makna kekuasaan dan Transformasi Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010
- Mashad, Dhuroruddin. *et, all. Konflik Elit Politik Pedesaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005
- Miall, Hugh. *et all. Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002
- Nawawi Hadari. *at all. Kepemimpinan Yang Efektif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2006

- Pranoto, Suhartono W. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010
- Prawiranegara, MR. Sjarifudin. *Sejarah Sebagai Pedoman Untuk Membangun Masa Depan*. Jakarta: PT. Inti Idayu Press.1981
- Pruit, Dean G. *et all, Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011
- Rofiq, Ainur.*Tafsir Resolusi Konflik*. Malang: UIN Maliki Press.2012
- Sasmita, Nurhadi,*et all.Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan sejarah Fakultas Sastra Ilmu Budaya Universitas Jember*.Yogyakarta: Lembah Mana.2012
- Sitepu, P Anthonius.*Teori-teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.2012
- Sjamsudin, Helius.*Metodologi Sejarah*.Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2012
- Sumbu, Telly,*et all. Kamus Umum dan Politik Hukum*. Jakarta: Jalan Permata Aksara. 2010
- Sundoro, Muhammad Hadi. *Teka-Teki Sejarah*. Jember: Jember University. 2009
- \_\_\_\_\_ *Keniscayaan Sejarah*. Jember: UPT Perpustakaan Unej.2013
- Usman, Sunyoto. *Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2012
- Widja, I Gde. *Sejarah Lokal Perspektif Dalam Pengajaran Sejarah*. Bandung:Angkasa. 1991
- Wirawan. *Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014
- Yusron. *Elit Lokal Dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.2009
- Zacharias, Danny. *et all. Metodologi Penelitian Pedesaan*. Jakarta:Cv. Rajawali.1984

**Online:**

Kecurangan Pilkades Desa Cermee Bondowoso 2015, (online), <https://www.youtube.com/watch?v=4VzBhU0apD8>. Diakses pada tanggal 29 April 2018, Pukul 18:56

Rizqi Setiawan, Demo Tuntut Pilkades Ulang Nyaris Ricuh, (online), <http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=7885&&top=1&&ktg=J%20Tapa%20Kuda&&keyrbk=&&keyjdl=demo>

Sengketa Pilkades Warga Geruduk Kantor Polisi, (online), <https://www.youtube.com/watch?v=IxyS1vaemHg>. Diakses pada tanggal 29 April 2018, Pukul 18:49

<http://pilkadesgrenden2013.blogspot.com/2013/07/pemilihan-kepala-desa-dari-jaman.html?m%3D1&hl=id-ID>

MohammadSolikin, <http://pilkadesgrenden2013.blogspot.com/2013/07/pemilihan-kepala-desa-dari-jaman.html?m%3D1&hl=id-ID>

<https://kamuslengkap.com/kamus/politik/arti-kata/team-sukses>, diakses pada tanggal 14 Januari 2019

<http://www.segmennews.com/2014/04/jelang-pileg-serangan-fajar-marak-warga-sibolga-resah>

<https://www.kompasiana.com/nimam/5cb5f5d8a8bc1553da458562/sejarah-serangan-fajar-dan-politik-uang-di-indonesia>

### **Skripsi:**

Anita Risky Wardhani, “Konflik Pilkades Di Desa SeLogudig Wetan Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Proboling”, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Sosiologi Universitas Jember, 2012

Alvin Eka Trijayanto, “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember (Analisis Yuridis Terhadap Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Des)”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015

Wuri Windayati, “Konflik Pemilihan Kepala Desa Kampunganyar Glagah Banyuwangi Tahun 2007-2010”, (Skripsi Fakultas Sastra Universitas Jember, 2015

### **Undang-Undang**

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Desa Kelurahan dan Kecamatan*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika

Undang-undang Nomor 22, Tahun 1948 Pasal 1, Tentang Penetapan Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Undang-Undang republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 Pasal 1, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Presiden Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Pasal 1, Tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso, No.5 Tahun 2014

Peraturan Bupati Bondowoso Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa

#### **Badan Pusat Statistik**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. Kabupaten Bondowoso *Dalam Angka Tahun 2013*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. Kabupaten Bondowoso *Dalam Angka Tahun 2014*

#### **Jurnal**

Amarru Muftie, *et all. Money Politic Dalam Praktik Demokrasi Indonesia, ejournal.* <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/25594/11618/>

**TABEL DAFTAR WAWANCARA**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Alamat</b>	<b>Waktu Wawancara</b>	<b>TTD</b>
1	Sutrisno S.H	46 Tahun	Kepala Desa Cermee	Cermee Bondowoso	1 Mei 2018	
2	Edy Sukamto	63 Tahun	Mantan Pegawai Kecamatan	Cermee Bondowoso	8 Agustus 2018	
3	Agus Puji Cahyono	35 Tahun	Wiraswasta	Cermee Bondowoso	20 November 2018	
4	Joko Segoro Kidul	43 Tahun	Perangkat Desa Cermee	Cermee Bondowoso	2 Agustus 2018	
5	Aswir	48 Tahun	Rt Dusun Barat Sawah	Cermee Bondowoso	5 Agustus 2018	
6	Mat Saleh	49 Tahun	Sekretaris Desa Cermee	Cermee Bondowoso	20 November 2018	
7	Misroto	35 Tahun	Kepala Dusun	Cermee Bondowoso	7 Agustus 2018	
8	H. Amirus Zamani	49 Tahun	Tokoh Masyarakat	Cermee Bondowoso	6 Agustus 2018	
9	Cung Diono	43 Tahun	Petani	Cermee Bondowoso	6 Agustus 2018	
10	Badrit Tamam	44 Tahun	Anggota BPD	Cermee Bondowoso	25 Juli 2018	
11	Hosjuto	50	Tokoh	Cermee	7 Agustus	

		Tahun	Masyarakat	Bondowoso	2018	
12	Subakir	50 Tahun	Petani	Cermee Bondowoso	7 Agustus 2018	
13	Imam Syafi'i	35 Tahun	Wiraswasta	Cermee Bondowoso	8 Agustus 2018	
14	Santi	26 Tahun	Staf TU SMP	Cermee Bondowoso	1 Agustus 2018	
15	Halimatus	24 Tahun	Wiraswasta	Cermee Bondowoso	1 Agustus 2018	
16	Ayuni	23 Tahun	Wiraswasta	Cermee Bondowoso	25 April 2018	
17	Mahfudz	26 Tahun	Guru SD	Cermee Bondowoso	21 November 2018	
18	Darlis	51 Tahun	Petani	Cermee Bondowoso	8 Agustus 2018	
19	Nini	47 Tahun	Petani	Cermee Bondowoso	1 Februari 2018	
20	Supat	50 Tahun	Wiraswasta	Cermee Bondowoso	19 November 2018	

## Lampiran

### Lampiran A

#### 1. Surat Izin Penelitian Ke Kantor Desa Cermee

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU BUDAYA**  
Jl. Kalimantan No. 37 - Kampus Tegal Bato Kotak Pos 185  
Telp. (0331) 337818 - Fax. (0331) 332738  
JEMBER 68121

Nomor : 1675/UN25.1.6/LL/2018 24 April 2018  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bondowoso  
di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat, mahasiswa Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember berikut ini sedang mempersiapkan tugas akhir (skripsi) dan akan mengadakan penelitian:

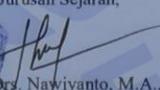
Nama : Sri Wahyuni  
NIM : 140110301006

Adapun tempat / lokasi yang dituju untuk penelitian sebagai berikut:

1. Kantor Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso.
2. Kantor Desa Cermee, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso.

Sehubungan dengan ini, kami mohon saudara memberikan izin kunjungan kepada mahasiswa tersebut di atas. Kegiatan/kunjungan ini digunakan untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan Program Sarjana S1.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

  
Ketua Jurusan Sejarah,  
Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D.,  
NIP. 196612211992011001



## 2. Surat Izin Penelitian Ke Pengadilan Negeri Bondowoso

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU BUDAYA**  
Jl. Kalimantan No. 37 - Kampus Tegal Boto Kotak Pos 185  
Telp. (0331) 337818, Fax. : (0331) 332738  
JEMBER 68121

Nomor : 2582/UN25.1.6/LL/2018 10 Juli 2018  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Bondowoso  
di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat, mahasiswa Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember berikut ini sedang mempersiapkan tugas akhir (*praskripsi*) dan akan mengadakan penelitian:

Nama : Sri Wahyuni  
NIM : 140110301006

Sehubungan dengan ini, kami mohon saudara memberikan izin kunjungan kepada mahasiswa tersebut di atas. Kegiatan/kunjungan ini digunakan untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan data dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi untuk Program Sarjana S1.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ketua Jurusan Sejarah,  
  
Prof. Dr. Nawiyanto, M.A., Ph.D.  
NIDN 196612211992011001



## 3. Surat Telah Melakukan Penelitian Di Pengadilan Negeri Bondowoso



PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO  
Jalan Santawi No. 59 TELP. (0332) 421445 – 421091  
Faksimil : 0332 – 422454  
E-mail : pn.Bondowoso@yahoo.co.id

---

**SURAT KETERANGAN MENGADAKAN PENELITIAN**  
NOMOR : W.14.U.6/345/KP.01.2/7/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHUSAINI, SH, MH  
N i p : 19640812 199212 1 001.  
Pangkat / Golongan : PEMBINA UTAMA MUDA ( IV / c )  
Jabatan : KETUA PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

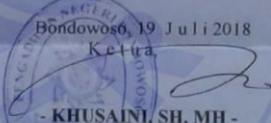
Nama : SRI WAHYUNI  
N i m : 140110301006.  
Pendidikan : JURUSAN SEJARAH UNIVERSITAS JEMBER

Bahwa nama tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Bondowoso, selama 2 Hari terhitung dari tanggal 18 Juli 2018 s / d 19 Julii 2018.

Data jumlah Konflik Pemilihan Kepala Desa di Pengadilan Negeri Bondowoso sebagai berikut :

1. Nomor. 21 / Pdt. G / 2015	Desa Jambesari.
2. Nomor. 22 / Pdt. G / 2015	Desa Jambesari
3. Nomor. 23 / Pdt. G / 2015	Desa Curahdami
4. Nomor. 27 / Pdt. G / 2015	Desa Curahdami
5. Nomor. 28 / Pdt. G / 2015	Desa Pekalangan
6. Nomor. 29 / Pdt. G / 2015	Desa Cermee

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 19 Juli 2018  
Ketua,  
  
- KHUSAINI, SH, MH -  
NIP. 19640812 199212 1 001



Lampiran B

1 Radar Ijen Koran Sengketa Pilkades Masuk Ranah Pengadilan



2. Radar Ijen Koran Dijaga Ketat Petugas Kepolisian



Banyak Penderita Terlambat Berobat

### 3. Radar Ijen Koran Pilkades Sementara Aman



### 4. Radar Ijen Koran Tuntut Pilakdes Ulang



5. Radar Ijen Koran 151 Dilantik, 21 Nyusul



6. Masih Sengketa Tetap Dilantik



## 7. Ingat Masih Ada Proses



Lampiran C

1. Ijazah SD Sutrisno



2. Ijazah SMP Sutrisno



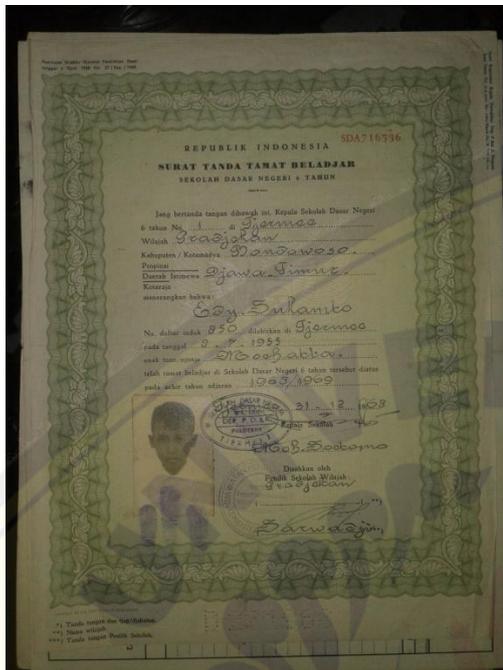
3. Ijazah SMA Sutrisno



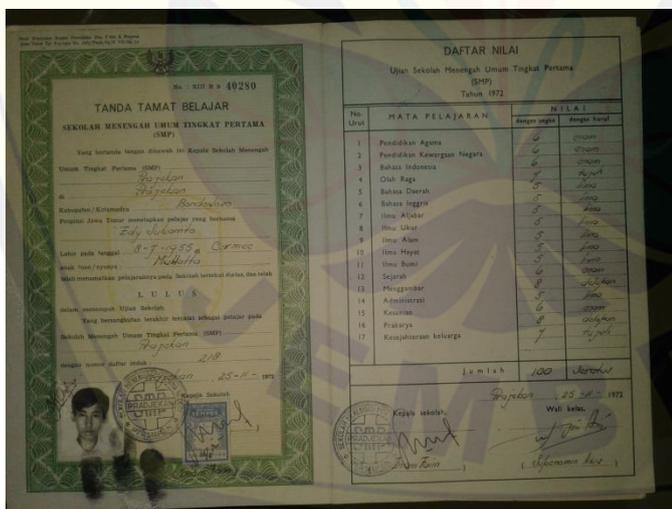
4. Ijazah S1 Sutrisno



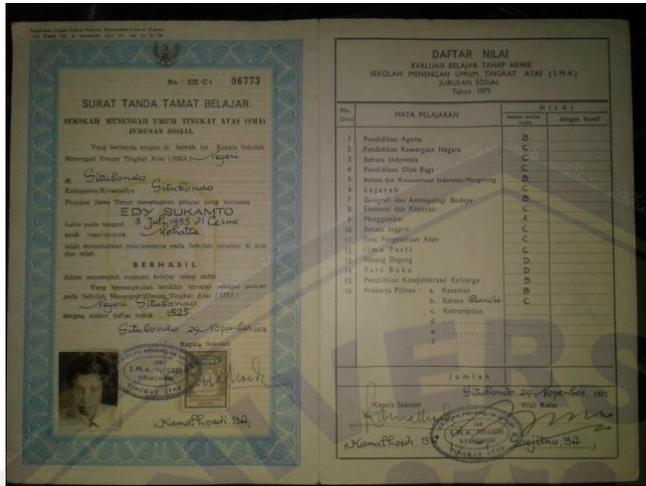
5. Ijazah SD Edy Sukamto



6. Ijazah SMP Edy Sukamto



7. Ijazah SMA Edy Sukamto

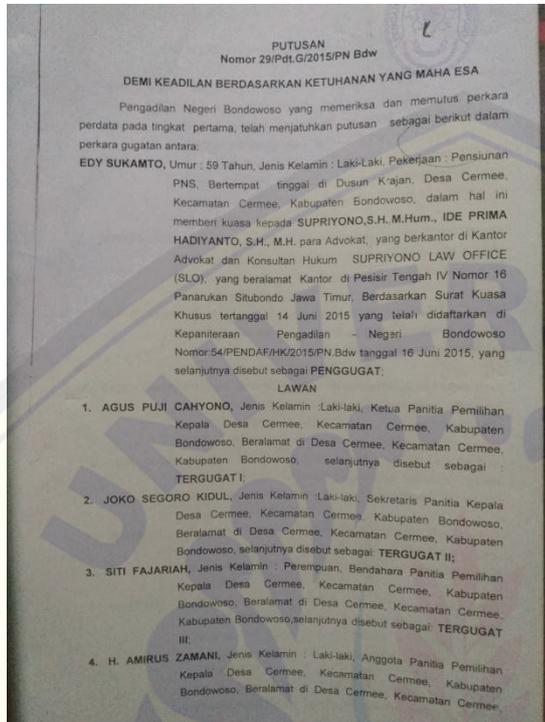


8. SK Pangkat Edy Sukamto



## Lampiran D

## 1. Arsip Pengadilan Negeri Bondowoso, Putusan Perkara Tahun 2015



Lampiran E

1. Foto Kantor Desa Tahun 2012



*Sumber: Arsip Kantor Desa Cermee Tahun 2012*

2. Foto Kantor Desa Tahun 2016



*Sumber: Arsip Kantor Desa Cermee Tahun 2016*

3. Kegiatan Pengajian Rutin



*Sumber: Arsip Kantor Desa Cermee Pengajian Rutin*

4. Kerja Bakti Desa



*Sumber; Arsip Kantor Desa Cermee Kerja Bakti*

Lampiran F

1. Foto wawancara dengan Edy Sukamto



2. Foto wawancara dengan Sutrisno



3. Wawancara dengan Bapak Agus Puji Cahyono selaku Ketua Panitia Pilkades



4. Wawancara dengan Bapak Joko Segoro Kidul selaku Bendahara Panitia Pilkades



5. Wawancara dengan Bapak Imam Syafi'i selaku Tim Sukses Edy Sukanto



6. Foto wawancara dengan H. Hosjuto tim sukses Sutrisno



7. Foto wawancara dengan H. Hosjuto tokoh masyarakat dan anggota panitia pilkades



8. Foto wawancara dengan Badrit Tamam BPD Desa Cermee



9. Foto wawancara dengan Wiwik dan Riyadi pegawai Pengadilan Negeri Bondowoso



### **SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Sutrisno  
Pekerjaan : Kepala Desa  
Alamat : Desa Cermee

Menerangkan bahwa saudara

Nama : Sri Wahyuni  
Alamat : Desa Kladi, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul “Konflik Pemilihan Kepala Desa Cermee Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2016”

Demikian kami buat surat ini dengan sebenarnya

Bondowoso, 13 Agustus 2019

Sutrisno

### Hasil Wawancara

Pada Pemilihan Kepala Desa Cermee tahun 2015 mendapat perolehan suara 2.132.000 suara. Dukungan yang saya peroleh dari kerabat, keluarga, dan masyarakat. Selain dukungan dari masyarakat saya menjadi kepala desa juga karena faktor keturunan, ayah saya mantan Kepala Desa Cermee. Menurut masyarakat, seseorang yang memiliki keturunan menjadi kepala desa, apabila ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa, ia akan berhasil terpilih karena sudah dianggap patut untuk menjadi pemimpin. Pencalonan dan kemenangan ini merupakan yang kedua kalinya bagi saya, karena pada periode yang sebelumnya saya sudah pernah menjadi kepala desa. Tujuan Sutrisno mencalonkan diri kembali, untuk menyelesaikan dan menjalankan program kerjanya yang belum terealisasi sebelumnya.

Adanya ketidakterimaan yang dirasakan oleh pendukung yang kalah, saya tidak tahu secara jelas, namun ada orang yang bilang sama saya kalau pihak pendukung yang kalah tidak menerima atas kemenangan yang saya dapatkan. Sikap tidak senangnya masyarakat terhadap saya juga ditunjukkan dengan melakukan demo dan menduga bahwa panitia melakukan kecurang dan berpihak kepada saya. Selain itu masyarakat juga menyebarkan isu-isu yang tidak baik tentang saya. Masyarakat hanya melihat sisi negatif saja namun tidak ingin melihat sisi positif selama saya bekerja sebagai kepala desa. Oleh karena itu dalam konflik ini saya digugat oleh pihak pendukung yang kalah, namun rezeki masih berpihak kepada saya, dalam hasil gugatan tersebut saya dinyatakan tidak bersalah.

Bondowoso, 21 Oktober 2018

Responden

Sutrisno



### **SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Edy Sukamto  
Pekerjaan : PNS Kecamatan  
Alamat : Desa Cermee

Menerangkan bahwa saudara

Nama : Sri Wahyuni  
Alamat : Desa Kladi, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul “Konflik Pemilihan Kepala Desa Cermee Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2016”

Demikian kami buat surat ini dengan sebenarnya

### **Hasil Wawancara**

Tujuan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Cermee selain mendapatkan dukungan dari keluarga dan masyarakat, adalah untuk menyalurkan visi dan misi saya terkait pembangunan dan kemajuan desa. Harapan saya apabila saya terpilih menjadi kepala desa, saya ingin membuka lapangan pekerjaan bagi generasi muda atau pemuda desa. Pada pemilihan ini saya mendapatkan nomer urut dua dan mendapat perolehan suara 2.089.000 suara. Artinya saya mendapatkan suara terendah dari calon kepala desa nomer urut satu. Pencaonan ini merupakan pencalonan pertama bagi saya, meskipun sebelumnya saya sudah pernah menjadi kepala desa pengganti di desa lain. Dukungan yang saya dapat berasal dari keluarga, kerabat, dan masyarakat.

Dalam pemilihan pasti ada yang menang dan ada yang kalah, karena hal itu sudah biasa. Jadikan kekalahan itu pelajaran untuk terus berusaha menjadi lebih baik kedepannya.

Bondowoso, 8 Agustus 2019

Responden

Edy Sukamto

### **SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Joko Segoro Kidul  
Pekerjaan : Sekretaris Panitia Pilkades  
Alamat : Desa Cermee

Menerangkan bahwa saudara

Nama : Sri Wahyuni  
Alamat : Desa Kladi, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul “Konflik Pemilihan Kepala Desa Cermee Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2016”

Demikian kami buat surat ini dengan sebenarnya

### **Hasil Wawancara**

Terkait kemenangan Sutrisno memang menjadi masalah. Artinya setelah ia ditetapkan menjadi Kepala Desa Cermee untuk yang kedua kali, Justus ia mendapatkan tantangan yang lebih berat dari yang sebelumnya. Posisinya yang sebagai kepala desa menjadi terancam dan tidak nyaman. Hal ini dikarenakan adanya ketidakterimaan dari pendukung pihak yang kalah. Pendukung pihak yang kalah tidak menerima kemenangan yang didapatkan Sutrisno, karena menurut pendapat mereka kinerja Sutrisno kurang baik untuk menjadi kepala desa. Selain itu ia juga menduga adanya kecurangan yang dilakukan oleh panitia terhadap proses pilkades. Adanya orang-orang yang tidak suka dengan Sutrisno, dapat memunculkan berita-berita yang kurang enak didengar.

Bondowoso, 4 April 2019

Responden

Joko Segoro Kidul

### **SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Badrit Tamam  
Pekerjaan : Skretaris BPD Desa Cermee  
Alamat : Desa Cermee

Menerangkan bahwa saudara

Nama :Sri Wahyuni  
Alamat : Desa Kladi, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul “Konflik Pemilihan Kepala Desa Cermee Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2016”

Demikian kami buat surat ini dengan sebenarnya

### HASIL WAWANCARA

Akibat terjadinya kecurangan, pendukung dari pihak yang kalah tidak menerima atas kekalahannya. Selain itu, panitia diduga berpihak kepada calon kepala desa yang terpilih. Dari penjelasan BPD Desa Cermee, Sutrisno dan panitia tidak melakukan kecurangan. Hanya saja pendukung pihak yang kalah, mencari kesalahan untuk membela pihak Edy Sukamto. Hal ini karena pendukung tidak menerima apabila hasil pemilihan kepala desa tersebut dimenangkan oleh Sutrisno. Hal ini wajar dalam proses pemilihan kepala desa, karena merupakan salah satu proses demokrasi dalam pemilihan kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa wajar jika ada yang menang dan ada yang kalah.

Bondowoso, 25 Juli 2018

Responden

Badrit Tamam

### **SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Imam Syafi'i

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Cerme

Menerangkan bahwa saudara

Nama : Sri Wahyuni

Alamat : Desa Kladi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul "Konflik Pemilihan Kepala Desa Cerme Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2016"

Demikian kami buat surat ini dengan sebenarnya

### Hasil Wawancara

Kecurangan yang dilakukan oleh panitia ditemukan satu hari setelah pemilihan kepala desa. Pada saat saya dan teman-teman yang lain melakukan demo ke Kantor Desa Cerme, saya dan teman-teman menemukan adanya surat suara sebanyak 8 kresek yang berada di luar kotak suara. Saya menemukan surat suara tersebut di ruangan kantor desa. Surat suara yang saya temukan itu langsung saya bawa ke kapolsek dan meminta panitia untuk memberikan keterangan, tetapi jawaban dari salah satu panitia bahwa hal tersebut merupakan keteledoran pihak panitia. Jawaban tersebut tidak wajar, jadi saya langsung menindak lanjuti menindak lanjuti kasus tersebut ke ranah hukum. Saya bawa kasus itu ke pengadilan dengan melakukan gugatan, agar semuanya selesai dengan keputusan yang telah ditentukan oleh pihak pengadilan.

Bondowoso, 8 Agustus 2018

Responde

Imam Syafi'i